



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Assessment Kinerja Perekonomian dan Layanan Publik
di Wilayah Kalimantan

Edisi September 2023

Executive Summary

- Melanjutkan pembahasan laporan edisi Agustus sebelumnya, pada edisi kali ini LPEFD akan mulai membahas kinerja masing-masing regional. Pada edisi bulan September ini, pembahasan akan difokuskan kepada wilayah **Pulau Kalimantan**.
- Pada **tajuk Kinerja Makroekonomi dan Pembangunan**, akan diulas mengenai perkembangan perekonomian daerah-daerah di pulau Kalimantan yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif signifikan dan mengalami percepatan pemulihan ekonomi semenjak pandemi. Kenaikan harga komoditas dapat direspon dengan baik melalui kebijakan yang dapat meratakan pembangunan sehingga kemiskinan dan pengangguranpun menunjukkan penurunan yang konsisten.
- Selanjutnya, untuk pengembangan ke depan, **tajuk Kinerja dan Spasial dan Sektoral Daerah** akan mengulas potensi unggulan yang perlu terus dikembangkan oleh wilayah Kalimantan. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah Kalimantan terfokus pada pertumbuhan sektor primer yaitu pertambangan dan penggalian serta pertanian. Area pengembangan pembangunan tidak hanya di sektor tersebut, akan tetapi terdapat sektor lain yang potensial untuk terus dikelola, yaitu sektor pengadaan air dan pengolahan limbah serta transportasi pergudangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya proyek-proyek yang melibatkan sumber daya air dan transportasi di Kalimantan yang masih dalam proses pertumbuhan yang optimal. Kebijakan hilirisasi industri serta pembangunan proyek pelayanan publik diharapkan mampu menjadi katalisator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Katalisator pertumbuhan daerah juga dapat dilihat dari kinerja TKD. **Tajuk Kinerja Fiskal** akan mengulas bagaimana Pertumbuhan TKD di daerah-daerah se-pulau Kalimantan terlihat tumbuh kuat dan sebagian besar didukung oleh pertumbuhan DBH yang cukup meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas dunia yang mengakibatkan realisasi penerimaan DBH Minerba dan DBH migas yang menjadi motor pertumbuhan utama sektor unggulan dari Kalimantan terpenuhi sesuai dengan prognosa awal tahun. Namun, mengingat pertumbuhan yang ditopang oleh penerimaan SDA akan berlangsung terbatas, oleh karena itu selaras dengan analisis potensi dalam tajuk sebelumnya, perlu dilakukan diversifikasi ekonomi ke sektor lainnya agar pertumbuhan ekonomi daerah wilayah Kalimantan dapat berkelanjutan. Selain itu pembentukan Dana Abadi Daerah dari sebagian surplus daerah dapat berguna untuk kemanfaatan lintas generasi

Executive Summary - 2

- Selain dukungan TKD, **Kinerja Fiskal Daerah** juga penting dilihat. Pertumbuhan pendapatan daerah di Kalimantan lebih banyak pada jenis pajak daerah yang terkait kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Tingginya pajak Kendaraan Bermotor menggambarkan aktivitas perekonomian masyarakat Kalimantan yang cenderung meningkat. Tidak hanya itu, tingkat compliance pembayaran pajak juga meningkat karena adanya penggunaan teknologi yang membantu pengelola pembayaran pajak agar lebih efektif. Pendapatan daerah juga berhubungan dengan kinerja Belanja Daerah yang juga cenderung meningkat dari fungsi ekonomi dan perlindungan sosialnya karena pengelolaan keuangan daerah yang baik dan pemerataan pembangunan sampai ke masyarakat.
- Berkembangnya sektor-sektor unggulan serta perekonomian Kalimantan juga mempengaruhi percepatan terjadinya reformasi struktural. Dalam tajuk **Reformasi Struktural**, dijelaskan bahwa region Kalimantan memiliki kondisi reformasi struktural yang berimbang di mana terdapat beberapa aspek yang menunjukkan kinerja yang di atas rata-rata nasional dan di bawah rata-rata nasional. Sisi *governance* dan regulasi bisnis yang ditunjukkan dengan indeks reformasi birokrasi dan PTSP terlihat lebih baik daripada rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemda di wilayah Kalimantan mendukung ekonomi dari sisi pemerintahan untuk menstimulus ekonomi daerah.
- Pada tajuk **Kinerja Layanan Publik**, akan diulas berkenaan dengan kondisi layanan kesehatan di wilayah Kalimantan, seiring dengan adanya prioritas penanganan masalah stunting. Pengukuran kinerja layanan kesehatan tersebut dilakukan dengan pembangunan indeks kesehatan. Tampak pada indeks kesehatan, bahwa mayoritas daerah di Kalimantan berada pada kuadran yang memiliki indeks kesehatan di atas rata-rata nasional dan cenderung memiliki kapasitas fiskal yang tinggi. Hal ini perlu didukung terus dengan memaksimalkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Executive Summary - 3

- Lebih lanjut, untuk mendukung kebijakan penurunan prevalensi stunting, pada tajuk **Kajian Khusus** akan diulas bagaimana kualitas belanja daerah terkait penanganan stunting berpengaruh terhadap kinerja penurunan prevalensi stunting di daerah. Dalam penanganan stunting dibutuhkan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dari sisi pemerintah daerah, langkah yang dapat diambil adalah optimalisasi belanja daerah terkait stunting. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada belanja yang paling berdampak besar untuk penurunan stunting di daerah secara umum (rata-rata) dalam hal ini hasil model regresi dengan path analysis adalah belanja jasa. Belanja jasa yang sifatnya cepat dirasakan masyarakat juga dapat difokuskan dalam penanganan stunting, misalnya pelayanan tenakes di posyandu yang berkaitan dengan ibu hamil, jasa Pendidikan dan jasa tenaga persampahan.
- Terkait penanganan stunting, dalam tajuk **Inovasi Daerah** akan membahas inovasi pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penanganan stunting, yakni pemanfaatan sistem database geospasial untuk memetakan keadaan stunting di daerah Kabupaten Kubu Raya sehingga intervensi di setiap daerah dapat dilakukan secara tepat dan efektif.
- Perkembangan makro dan mikroekonomi, fiskal, serta pelayanan publik dari daerah-daerah di Kalimantan ini dapat menjadi contoh baik bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia sehingga percepatan pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara massif di semua daerah di Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia 2045 yang memiliki ekonomi maju, pembangunan merata, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

Daftar Isi

Executive Summary 2

Daftar Isi 5

Kinerja Makroekonomi dan
Pembangunan 6

Kinerja Ekonomi Spasial dan
Sektoral Daerah 10

Kinerja Transfer ke Daerah 15

Kinerja Fiskal Daerah 20

Reformasi Struktural Wilayah
Kalimantan 26

Kinerja Pelayanan Publik 32

Kajian Khusus 41

Inovasi Daerah 48



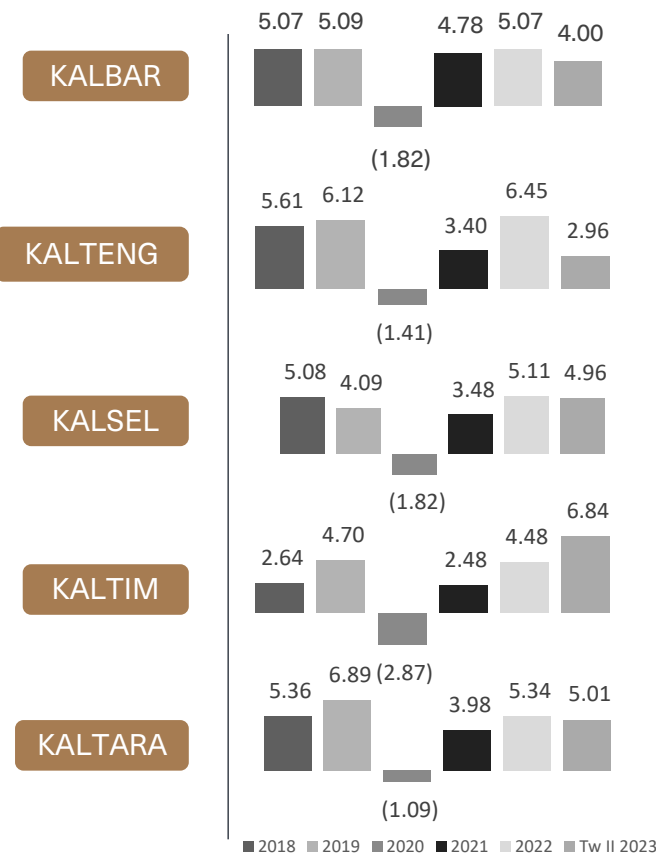


KINERJA MAKROEKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Ananta Sugiyarto dan Efriyazwar

KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI DI KALIMANTAN

• Pertumbuhan Ekonomi



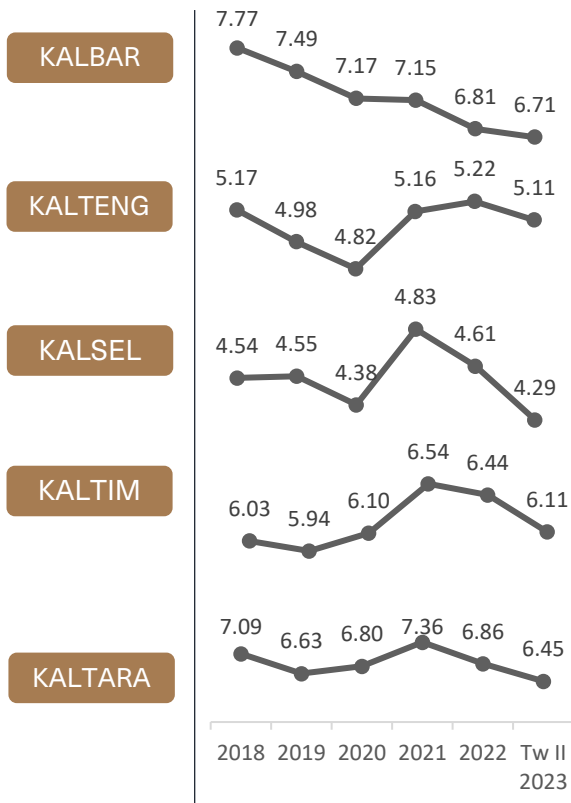
Pertumbuhan ekonomi di regional Kalimantan pada tahun 2022 tumbuh rata-rata sebesar 5,29% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu rata-rata sebesar 3,62%. Aktivitas ekonomi di wilayah Kalimantan cenderung identik. Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45% hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar 3,40% dan paling tinggi diantara provinsi lainnya. Sementara itu, provinsi Kalimantan Timur tumbuh paling rendah di regional Kalimantan sebesar 4,48% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,38%. Pertumbuhan tersebut terjadi di tengah kondisi perekonomian global mengalami penguatan pasca pandemi serta kenaikan harga komoditas di pasar global, yang juga berimbas pada ekonomi Indonesia terutama di regional Kalimantan.

LPEFD September 2023



Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II regional Kalimantan tetap tumbuh rata-rata sebesar 4,75% dimana provinsi Kalimantan Timur sampai dengan triwulan II tumbuh paling tinggi sebesar 6,84% sedangkan provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II tumbuh paling rendah sebesar 2,96%.

• **Tingkat Kemiskinan**

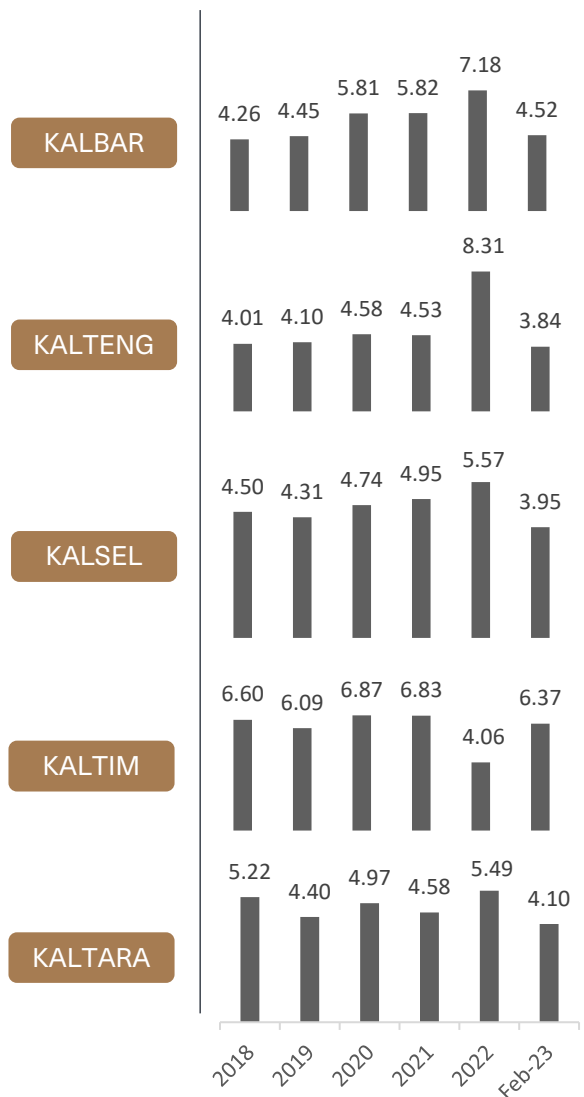


Kualitas pertumbuhan ekonomi kita juga semakin baik dimana terlihat bahwa manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat terutama di regional Kalimantan. Tingkat kemiskinan menunjukkan angka yang terus menurun, dari rata rata sebesar 6,21% di tahun 2021, turun menjadi rata-rata sebesar 5,99% di tahun 2022, dan pada semester 1 tahun 2023 turun menjadi rata-rata sebesar 5,73%.

Secara spasial, pada tahun 2022 persentase penduduk miskin tertinggi di regional Kalimantan berada di provinsi Kalimantan.

Utara sebesar 6,86% sedangkan persentase penduduk miskin terendah berada di provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,61%. Lebih lanjut, pada semester 1 tahun 2023 persentase penduduk miskin tertinggi masih berada di provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,71%, sedangkan persentase penduduk miskin terendah berada di provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,29%. Sementara itu, penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi di regional Kalimantan kecuali provinsi Kalimantan Tengah dimana justru mengalami kenaikan. Penurunan persentase tertinggi penduduk miskin dicapai oleh provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,5%.

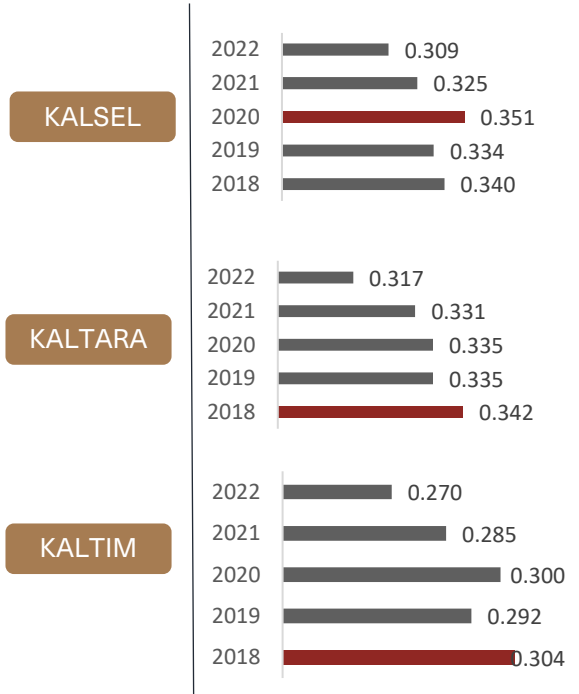
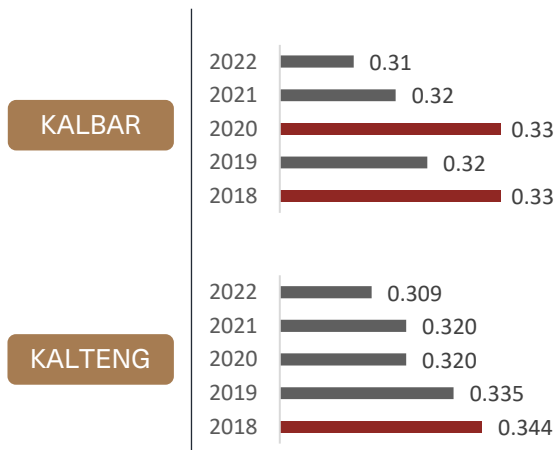
• **Tingkat Pengangguran**



Perekonomian daerah sensitif terhadap mobilitas fisik, Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di regional Kalimantan rata-rata mengalami kenaikan menjadi 6,12% dari tahun sebelumnya sebesar 5,34% dan pada bulan Februari tahun 2023 turun menjadi sebesar 4,56%.

Secara spasial, pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka tertinggi di regional Kalimantan berada di provinsi Kalimantan Tengah sebesar 8,31%, hal ini perlu penanganan lebih, sedangkan persentase tingkat pengangguran terbuka berada di provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,06%. Selanjutnya, pada bulan Februari tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka tinggi masih berada di provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,37%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah berada di provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3,84%. Sementara itu, kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi di regional Kalimantan kecuali provinsi Kalimantan Timur dimana justru mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi tingkat pengangguran terbuka dicapai oleh provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3,78%.

• **Rasio Gini**

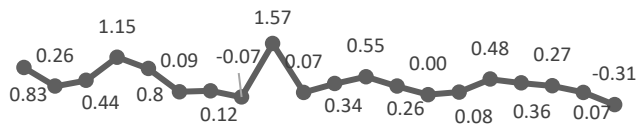


Ketimpangan pendapatan di regional Kalimantan termasuk lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Ketimpangan pendapatan terus menurun, dari rata rata sebesar 0,315 di tahun 2021, turun menjadi rata-rata sebesar 0,303 di tahun 2022 lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,38.

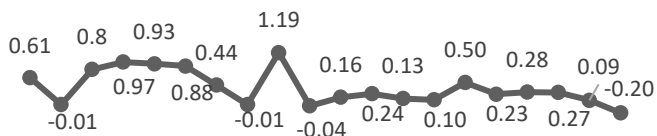
Secara spasial, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan tertinggi di regional Kalimantan berada di provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,317 sedangkan ketimpangan pendapatan terendah berada di provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,270. Sementara itu, penurunan ketimpangan pendapatan pada tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi di regional Kalimantan. Penurunan ketimpangan pendapatan tertinggi dicapai oleh provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,16 sedangkan terendah berada di provinsi Kalimantan Barat yang hanya turun sebesar 0,04.

• **Inflasi**

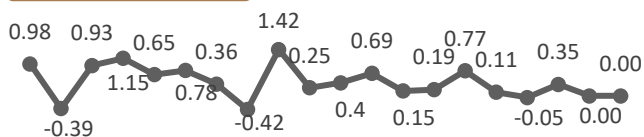
KALBAR



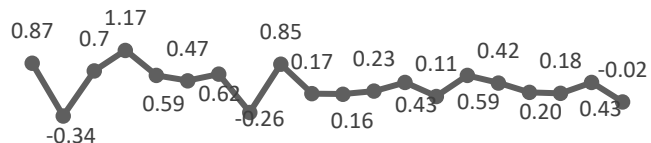
KALTENG



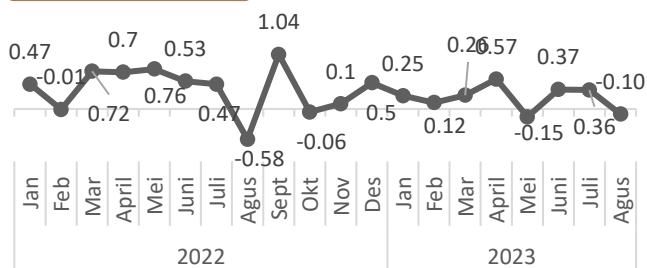
KALSEL



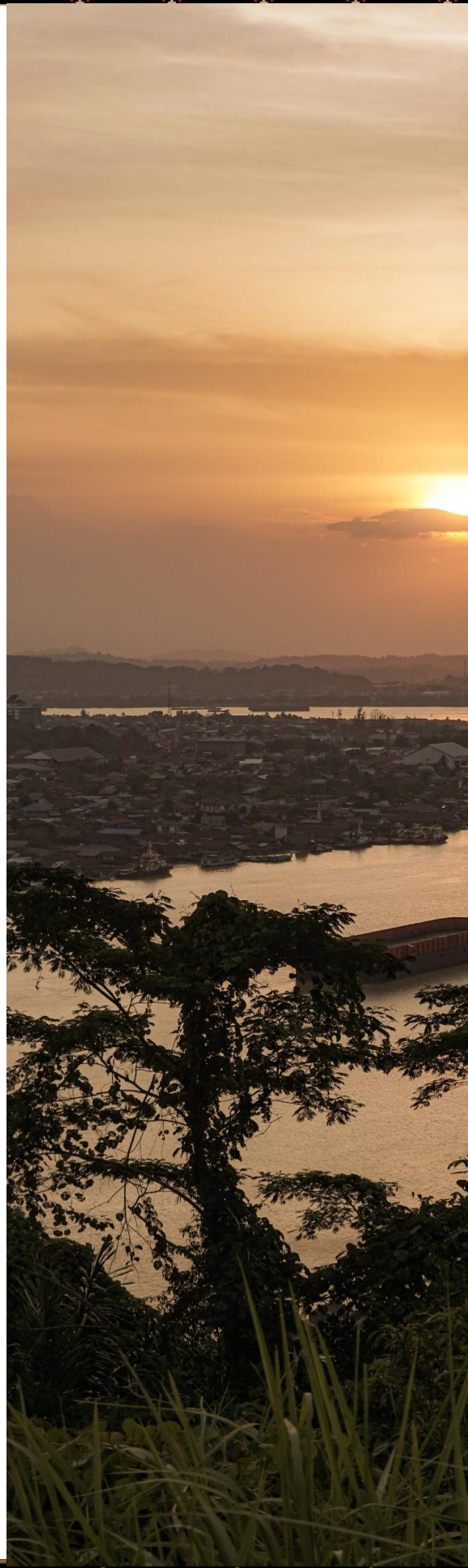
KALTIM



KALTARA



Sementara itu, laju inflasi di wilayah Kalimantan pada bulan Agustus 2023 secara umum mengalami penurunan dari bulan sebelumnya, penurunan laju inflasi tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan penurunan sebesar 0,31% diikuti Provinsi Kalimantan Tengah dengan penurunan inflasi sebesar 0,20%.





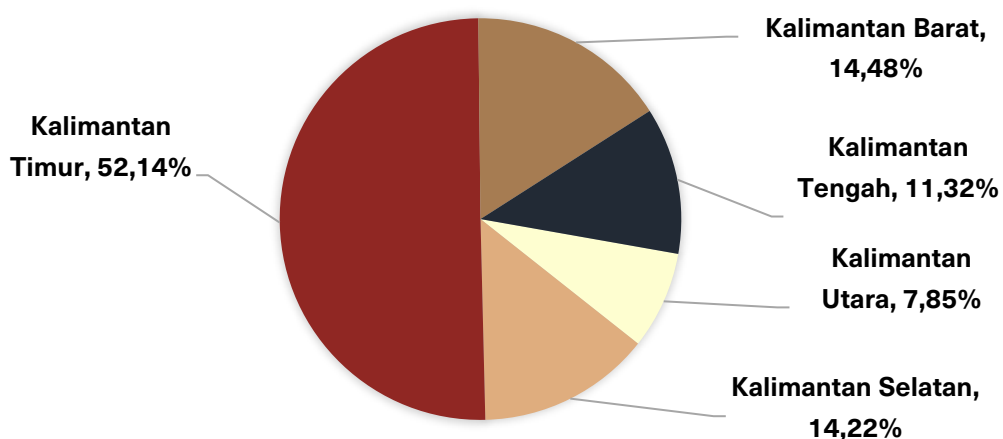
KINERJA SPASIAL DAN SEKTORAL DAERAH

Britany Alasen Sembiring dan Rossi Rizki Bestari

Dalam edisi sebelumnya telah di bahas mengenai dasar penentuan sektor unggulan dan potensial secara nasional berdasarkan empat metode yakni *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan analisis *overlay*. Dalam edisi kali ini, dengan metode dan basis data yang sama yakni tahun 2016-2022, akan dikaji lebih mendalam khususnya di wilayah region Kalimantan. Secara garis besar, di region Kalimantan memiliki sektor basis dan potensial di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian.

Hal ini didukung dengan data struktur perekonomian tahun 2022 yang menunjukkan bahwa di sebagian besar provinsi di Pulau Kalimantan bahwa proporsi terbesar terhadap PDRB diantaranya masih didominasi oleh kedua sektor tersebut. Bahkan di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kontributor perekonomian terbesar di Pulau Kalimantan dengan proporsi 52,14%, sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi satu-satunya sektor basis dan potensial yang memiliki proporsi 53,24% dari total PDRB Kalimantan Timur. Sektor ini juga menjadi sektor paling dominan di Provinsi Kalimantan Selatan (32,05%) dan Kalimantan Utara (36,42%). Hal ini disebabkan oleh besarnya sumber daya pertambangan di wilayah Kalimantan dan saat ini menjadi pusat perhatian yang akan dikembangkan dan ditingkatkan daya saing produknya melalui hilirisasi industri pertambangan dan penggalian baik di level lokal maupun internasional.

Gambar 1. Struktur Perekonomian Regional Kalimantan Tw IV 2022



Provinsi	Sektor	Proporsi terhadap PDRB
Kalimantan Barat	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,1%
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12%
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,36%
	Jasa Pendidikan	3,34%
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35%
Kalimantan Tengah	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,47%
	Pertambangan dan Penggalian	16,32%
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,41%
	Jasa Pendidikan	4,42%
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,22%
Kalimantan Selatan	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,40%
	Pertambangan dan Penggalian	32,05%
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,36%
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,79%
	Jasa Pendidikan	3,95%
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,94%
Kalimantan Timur	Pertambangan dan Penggalian	53,24%
Kalimantan Utara	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,06%
	Pertambangan dan Penggalian	36,42%
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,99%

Lebih lanjut, meskipun sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial secara penghitungan termasuk dalam sektor basis dan potensial, namun kontribusinya dalam PDRB relatif tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan sektor lain seperti Industri Pengolahan yang di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, termasuk ke dalam sektor yang memiliki dominasi proporsi di atas rerata provinsi masing-masing.

Adapun, terdapat sektor-sektor potensial yang tumbuh dominan di masa mendatang pada regional Kalimantan sehingga didapat kesimpulan mengenai penentuan prioritas sektor yang dibangun. Metode penentuan prioritas sektor yang dibangun menggunakan analisis overlay yang menggabungkan analisis LQ, DLQ, dan rasio pertumbuhan sektor di masing-masing wilayah provinsi. Sektor-sektor yang prioritas dibangun/dikembangkan pertama lebih banyak ditemukan pada provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yaitu pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta Jasa Keuangan dan Pendidikan. Pada Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki sumber daya air yang dapat memenuhi kebutuhan dalam maupun luar daerah serta dijadikan proyek untuk penyediaan air minum. Pada RPJMD Kalsel strategi pengembangan pariwisata lebih memanfaatkan sumber daya airnya. Selain itu, terdapat proyek yang telah dibangun dan diresmikan Presiden Jokowi tahun 2023 untuk meningkatkan pelayanan publiknya yaitu berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banjarbakula. Oleh karena itu terdapat penambahan pasokan air di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.



Di Kalbar, banyaknya proyek-proyek pengolahan limbah sampah dan daur ulang pada membuat sektor ini juga menjadi basis pengembangan dengan pertumbuhan cukup dominan. Oleh karena itu, pengembangan sektor industri pengolahan limbah ini perlu mendapat perhatian lebih dari pada pemimpin daerahnya.

Sektor transportasi pergudangan di Kalteng menjadi motor pertumbuhan sektor pariwisata dan layak menjadi prioritas pertumbuhan karena banyak perusahaan yang terkait dengan pergudangan dan transportasi juga berlokasi di Kalteng. Selain itu, pertanian, kehutanan, dan penggalian juga menjadi sektor basis karena Kalteng menjadi lumbung pagi nasional. Sebagian besar sumber daya manusia bekerja baik di sektor pertanian maupun transportasi pergudangan. Kedepannya sektor pertanian menjadi sektor potensial dalam mendorong pertumbuhan sektor lainnya dan akan menjadi lebih berdayasaing tinggi jika dilakukan hilirisasi produk pertanian.



Sementara itu, Kalimantan Timur memiliki prioritas pengembangan pada sektor pengadaan pengolahan sampah limbah, perdagangan, penyediaan makanan minuman, jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki potensi untuk berkembang walaupun pertumbuhannya masih belum optimal walaupun kontribusi perekonomiannya hampir 50%. Sementara sektor konstruksi dan informasi komunikasi juga perlu dilakukan pengembangan dan stimulus. Hilirisasi industri dan perpindahan IKN dapat menjadi kebijakan yang akan mempercepat proses transformasi struktural sehingga stimulus pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lebih baik.

Perkembangan sektor primer masih menjadi fokus pada prioritas pembangunan. Misalnya, sektor pertanian, kehutanan, perikanan juga pertambangan penggalian masih perlu diberikan stimulus berupa hilirisasi industri serta insentif yang meningkatkan produktifitas serta nilai tambah daya saing produk dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Semua daerah di regional Kalimantan dapat dilakukan kerjasama antar daerah disesuaikan dengan potensi-potensi daerah sehingga tercipta Kawasan industri yang spesifik, berdaya saing serta efisien dalam biaya produksi.

Prioritas-prioritas pembangunan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak khususnya pimpinan kepala daerah masing-masing wilayah serta pelaku usaha yang membidangi. Mekanisme insentif pajak, subsidi dan stimulus fiskal pada masing-masing daerah diperlukan dalam mendukung terlaksananya reformasi struktural yang lebih baik.



Tabel 1. Hasil Analisis Overlay di Pulau Kalimantan

Provinsi	Sektor	Klasifikasi Pertumbuhan (Overlay)	Prioritas Pembangunan
Kalimantan Barat	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Dominan potensial	Prioritas pertama
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Dominan potensial	Prioritas pertama
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Pertambangan dan Penggalian	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rendah potensial	Prioritas ketiga
Kalimantan Timur	Jasa Pendidikan	Rendah potensial	Prioritas ketiga
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Jasa Pendidikan	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Pertambangan dan Penggalian	Rendah potensial	Prioritas ketiga
	Pengadaan Listrik dan Gas	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
	Konstruksi	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
	Transportasi dan Pergudangan	Rendah tak potensial	Prioritas ketiga
	Informasi dan Komunikasi	Rendah tak potensial	Prioritas ketiga
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rendah tak potensial	Prioritas ketiga
	Jasa lainnya	Rendah tak potensial	Prioritas ketiga
Kalimantan Tengah	Transportasi dan Pergudangan	Dominan potensial	Prioritas pertama
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Pertambangan dan Penggalian	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Jasa Pendidikan	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Industri Pengolahan	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
	Pengadaan Listrik dan Gas	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
Kalimantan Utara	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Pertambangan dan Penggalian	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Konstruksi	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Transportasi dan Pergudangan	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Jasa Pendidikan	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Jasa lainnya	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Pengadaan Listrik dan Gas	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
Kalimantan Selatan	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Dominan potensial	Prioritas pertama
	Jasa Pendidikan	Dominan potensial	Prioritas pertama
	Pertambangan dan Penggalian	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Real Estat	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Jasa Perusahaan	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Dominan potensial	Prioritas kedua
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rendah potensial	Prioritas kedua
	Pengadaan Listrik dan Gas	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
	Konstruksi	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
Jasa lainnya	Rendah tak potensial	Prioritas ketiga	



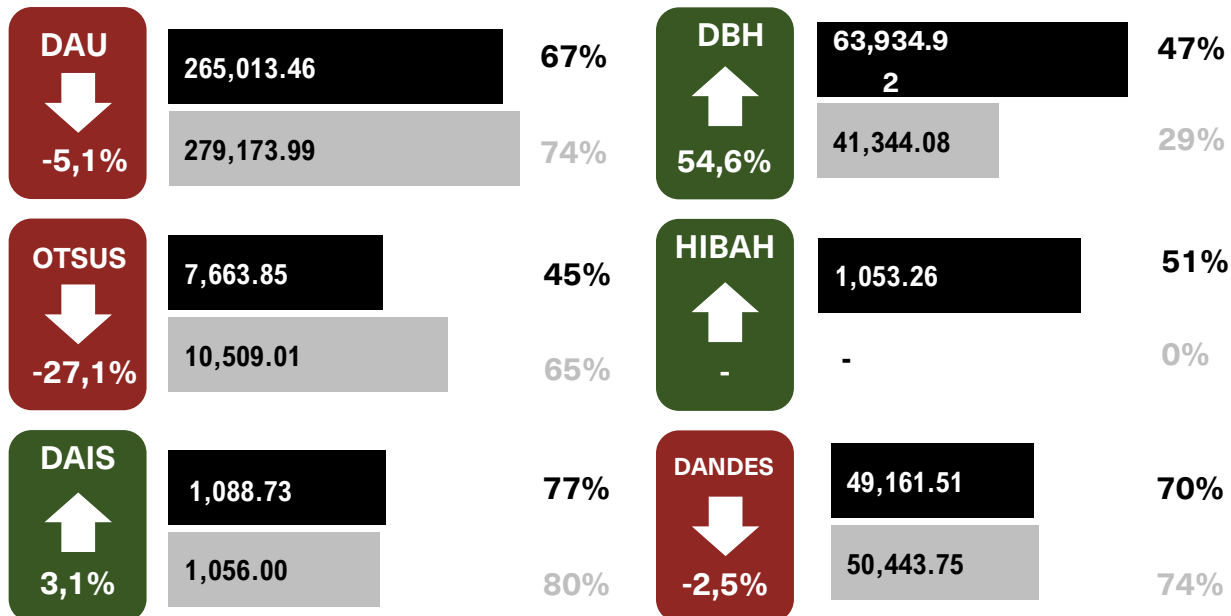
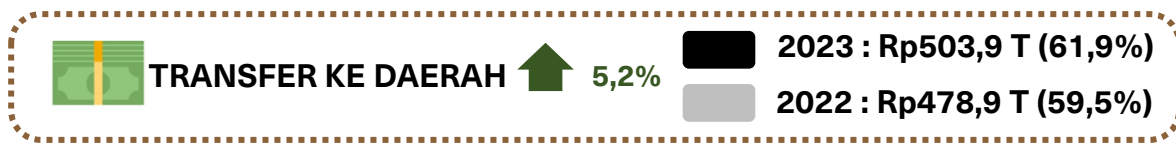
KINERJA TRANSFER KE DAERAH

Muhammad Hijrah

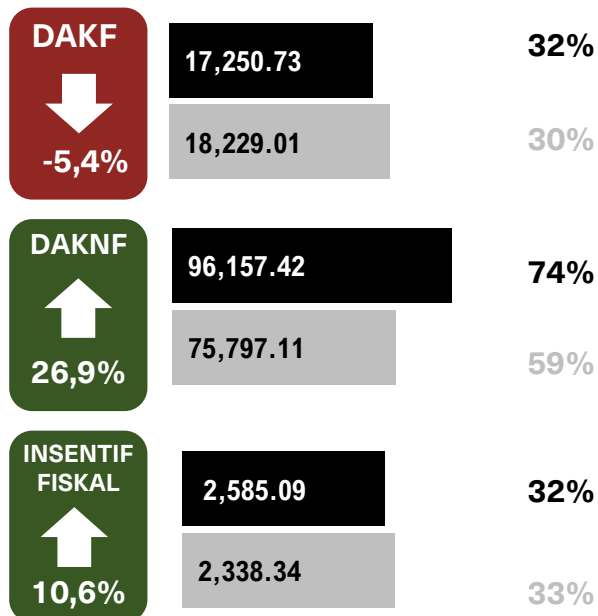
A. KINERJA TRANSFER KE DAERAH

PENYALURAN TKD PER AGUSTUS 2023 SEDIKIT LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN BULAN AGUSTUS 2022

REALISASI TKD DAN PERSENTASE TERHADAP ALOKASI



2023*
 2022*
 (dalam triliun rupiah) % dari pagu



- **DBH** lebih tinggi terutama dari naiknya pagu DBH khususnya jenis CHT, Minerba, dan Migas TA 2023.
- **DAK Nonfisik** dan **Insentif Fiskal** lebih tinggi terutama disebabkan karena peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur.
- **DAU** lebih rendah terutama karena pemda sedang menyiapkan syarat salur DAU spesifik tahap 2 dari 3 tahap penyaluran.
- **Otsus** lebih rendah karena daerah belum menyampaikan syarat salur.
- Secara nominal, **DAK Fisik** lebih rendah karena pagu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun, secara persentase penyaluran mengalami peningkatan.
- **Dana Desa** sedikit lebih rendah karena perubahan kebijakan pengalokasian (dibagi 2 tahap).

Transfer ke Daerah (TKD) dilaksanakan dalam rangka mendukung pendanaan penyelenggaraan urusan daerah serta pembangunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik di daerah. Penyaluran TKD sampai dengan akhir Agustus 2023 mencapai Rp503,9 Triliun atau tersalur 61,9% dari pagu alokasi TKD 2023. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kinerja TKD secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 5,2% year on year (YoY). Peningkatan tersebut terutama karena terdapat kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik serta Dana Keistimewaan DIY. Masih terdapat beberapa jenis TKD yang kinerja penyalurannya masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena pemda sedang menyiapkan pemenuhan syarat penyaluran.

DBH yang telah salur kepada pemda sebesar Rp63,9 Triliun atau telah salur sebesar 47% dari pagu DBH tahun 2023. Secara nominal, kinerja penyaluran DBH meningkat sebesar 54,6% YoY. Meningkatnya kinerja penyaluran DBH dikarenakan adanya peningkatan pagu alokasi DBH CHT, DBH Minerba, dan DBH Migas pada tahun 2023 ini yang disebabkan naiknya harga komoditas dunia.

DAK Fisik merupakan salah komponen yang mengalami perlambatan realisasi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni turun sebesar 5,4% YoY atau sebesar Rp18,2 Triliun pada tahun 2022 dan sebesar Rp17,2 Triliun pada tahun 2023 hal ini disebabkan pagu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun, secara persentase rasio penyaluran antara alokasi dan realisasi nya mengalami peningkatan sebesar 2%.

Realisasi DAK Nonfisik per 31 Agustus 2023 sebesar Rp96,15 Triliun atau 74% dari pagu alokasi 2023, realisasi tersebut tumbuh 26,9% jika dibandingkan dengan realisasi DAK Nonfisik tahun 2022 pada periode yang sama. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur.

Penurunan kinerja penyaluran TKD juga terjadi pada Dana Desa yang sedikit lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar -2,5% YoY. Dana Desa yang telah salur sampai dengan 31 Agustus 2023 sebesar Rp49,1 Triliun atau telah salur sebesar 70% dari pagu Dana Desa. Penurunan ini antara lain disebabkan karena perubahan kebijakan pengalokasian (dibagi 2 tahap). Pada tahun 2022, anggaran BLT Desa dipatok min 40%, sedangkan di tahun 2023 maksimal 25%. Persyaratan salur utk BLT relatif lebih mudah dibandingkan dngan nonBLT.

Penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 3,1% YoY. Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah salur sebesar Rp 1,08 Triliun atau telah salur sebesar 77% dari pagu Dana Keistimewaan DIY. Peningkatan kinerja penyaluran yang sangat tinggi disebabkan adanya percepatan penyampaian syarat salur tahap II berupa penyampaian laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja Tahap I.

Kinerja penyaluran insentif fiskal tumbuh 10,6% YoY. Insentif fiskal yang telah salur sampai dengan 31 Agustus 2023 sebesar Rp2,5 Triliun atau telah salur sebesar 32,0%. Hal ini antara lain dikarenakan jumlah pemda yg sudah menyampaikan laporan realisasi sebagai syarat salur bulan Agustus 2023 sudah lebih baik dibandingkan pada periode yg sama tahun lalu.

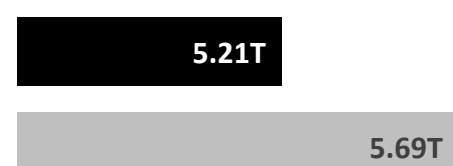
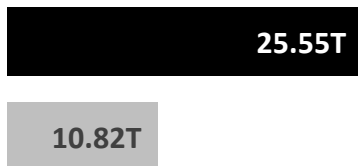
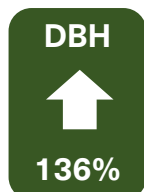
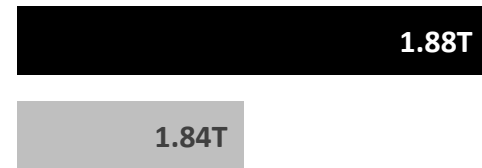
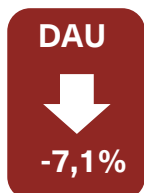
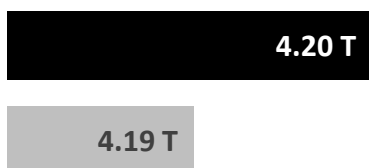
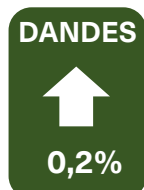
Sejak tahun 2023, hibah daerah sebagai bagian dalam alokasi TKD. Hibah daerah yang telah salur sampai dengan Agustus 2023 sebesar Rp1,05 Triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang diterushibahkan dan hibah luar negeri yang diterushibahkan. Adapun komponen Hibah ke Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sampai dengan 31 Agustus 2023 belum mencatatkan adanya realisasi dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan dan menunggu hasil reuiu APIP terlebih dahulu.

Di sisi lain, kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) secara nominal mengalami kontraksi sebesar -5,1%. DAU yang telah salur sampai dengan 31 Agustus 2023 sebesar Rp265,9 Triliun atau 67% dari pagu DAU. Belum tersalurnya DAU karena Pemda sedang menyiapkan syarat salur untuk DAU yang ditentukan penggunaannya. Kendala dari penyiapan syarat salur antara lain karena pelaksanaan kegiatan fisik di daerah yang belum optimal sehingga realisasi penyerapan belum memenuhi target minimal untuk syarat salur tahap berikutnya. Serta Pemda belum sepenuhnya mengajukan reimburse DAU Penggajian formasi PPPK untuk setiap bulan. Untuk itu, sebagai strategi percepatan DJPK akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pemda dengan berkolaborasi bersama Kemendagri dan K/L terkait, serta unit Kementerian Keuangan di daerah.

Turunnya kinerja penyaluran DAU diikuti juga dengan turunnya kinerja penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sampai dengan 31 Agustus 2023, penyaluran Dana Otsus sebesar 45%. Dalam periode ini telah disalurkan sebesar Rp7,6 Triliun atau 45% dari pagu Dana Otonomi Khusus. Turunnya kinerja salur Dana Otonomi Khusus disebabkan oleh belum seluruhnya provinsi-provinsi di Papua telah salur Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastrukturnya. Dana-dana tersebut belum salur dikarenakan beberapa pemerintah daerah di Provinsi Papua belum menyampaikan hasil validasi atas integrasi rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi/kabupaten/kota

B. KINERJA TKD PULAU KALIMANTAN

PENYALURAN TKD SE-KALIMANTAN PER AGUSTUS 2023 TUMBUH 24,9%
DIBANDINGKAN TAHUN LALU



■ **2023*** ■ **2022*** (dalam triliun rupiah) % dari pagu

- **DBH** tumbuh 136,0% terutama dari naiknya penerimaan dari SDA khususnya, Minerba, dan Migas.
- **Dana Desa** tumbuh 0,2% karena pemenuhan syarat salur yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
- **DAK Fisik** se-wilayah pulau Kalimantan lebih tinggi 2,4% karena pemenuhan persyaratan penyaluran mengalami peningkatan.
- **Insentif Fiskal** lebih rendah 4,6% karena sebagian daerah belum menyampaikan syarat salur.
- **DAU** lebih rendah 7,1% terutama karena pemda sedang menyiapkan syarat salur DAU spesifik tahap 2 dari 3 tahap penyaluran.
- **DAK Nonfisik** terkontraksi cukup dalam yaitu -8,4% yang disebabkan antara lain karena sebagian pemda belum memenuhi syarat salur.

Selaras dengan kinerja Pemerintah Pusat, kinerja TKD untuk pemda se-pulau Kalimantan juga lebih baik dari periode yang sama tahun lalu. Sampai dengan akhir Agustus 2023, kinerja TKD se-pulau Kalimantan tumbuh kuat 24,9%. Pertumbuhan ini secara garis besar ditopang oleh pertumbuhan DBH yang tumbuh 136,0% YoY. Secara lebih detail, penerimaan DBH yang besar ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas dunia yang mengakibatkan realisasi penerimaan DBH Minerba serta DBH Migas yang merupakan sumber-sumber utama dari pendapatan pulau Kalimantan naik melebihi prognosa yang telah dialokasikan pada awal tahun.

Meskipun pulau Kalimantan sedang menikmati *windfall profit* dari penerimaan SDA nya, perlu disadari bahwa Minerba dan Migas merupakan SDA yang tidak terbarukan dimana suatu saat sumber daya tersebut akan habis. Menghadapi kondisi tersebut, pemda yang kaya akan SDA yang tidak terbarukan dapat melakukan setidaknya dua hal yaitu: (i) melakukan diversifikasi ekonomi ke sektor lain yang akan terus memberikan pendapatan meskipun SDA tersebut habis. Sebagai contoh yang sangat terlihat, negara-negara timur tengah yang kaya akan minyak saat ini sudah mulai *shifting* ke sektor industri pariwisata sekaligus transportasi udara/transit hub dengan memanfaatkan letak geografisnya yang berada di antara negara-negara barat dan timur (ii) melakukan investasi jangka panjang agar penerimaan dari SDA yang tidak terbarukan tersebut dapat dinikmati lintas generasi. UU HKPD telah membuka jalan bagi pemda yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dan sangat tinggi serta layanan publiknya sudah baik untuk dapat memberntuk Dana Abadi Daerah, sehingga surplus penerimaan dari SDA dapat disimpan untuk kemanfaatan lintas generasi.

Selain DBH, kinerja Dana Desa juga tumbuh di wilayah pulau Kalimantan per Agustus 2023. Dana desa untuk wilayah ini telah tersalurkan Rp4,20 Triliun atau tumbuh 0,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya kinerja positif juga tercatat pada kinerja DAK Fisik yang telah disalurkan sebesar Rp1,88 Triliun atau tumbuh 2,4% YoY. Kinerja Dana Desa dan DAK fisik yang sudah baik ini perlu terus dipertahankan agar TKD dapat segera dinikmati untuk layanan publik di daerah.

Disisi lain, perbaikan perlu terus dilakukan untuk pemda di wilayah Kalimantan karena kinerja DAU, Insentif Fiskal dan DAK Non fisik pada periode Agustus 2023 ini masih lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran DAU pada periode ini sebesar Rp24,75 Triliun atau lebih rendah 7,1% YoY. Kinerja penyaluran DAU yang lebih rendah tersebut antara lain disebabkan karena pemda sedang berproses untuk menyiapkan syarat salur DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU earmarked) tahap 2 dari 3 tahap penyaluran. Terdapat 5 jenis DAU earmarked yaitu bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang pekerjaan umum, pendanaan kelurahan serta penggajian formasi P3K. Sebagaimana diketahui, kinerja penyaluran DAU khususnya untuk penggajian formasi P3K masih terdapat kendala di seluruh daerah di Indonesia. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemda, termasuk pemda di wilayah Kalimantan agar bisa memonitor perkembangan rekrutmen dan pengangkatan P3K sehingga pada saat gaji P3K dapat direalisasikan pemda dapat segera menyampaikan syarat salur DAU dimaksud.

Selanjutnya, kinerja penyaluran insentif fiskal juga terkontraksi 4,6% pada bulan ini. Jika pada periode yang sama tahun lalu penyaluran insentif fiskal telah mencapai Rp0,24 Triliun, di periode Agustus 2023 pemda di pulau Kalimantan baru mencatat penyaluran sebesar Rp0,23 Triliun. Terakhir, kinerja penyaluran DAK Non Fisik di pulau Kalimantan juga melambat 8,4% YoY. Di tahun lalu, kinerja DAK Non Fisik sudah mencapai Rp5,69 Triliun sedangkan pada periode Agustus tahun ini baru mencapai Rp5,21 Trilliun. Kinerja yang masih lebih rendah dari tahun lalu tersebut antara lain disebabkan karena sebagian daerah belum menyampaikan syarat salurnya. Reformasi TKD melalui UU HKPD menimbulkan beberapa perubahan dalam pengelolaan TKD. Pemda diharapkan dapat lebih *agile* untuk mengikuti perubahan dimaksud karena TKD merupakan salah satu sarana bagi pemda untuk dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



KINERJA FISKAL DAERAH

Muhammad Hijrah

KINERJA FISKAL DAERAH (LPEFD AGUSTUS 2023)

SUMMARY

Kinerja fiskal daerah sampai dengan bulan Agustus 2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu baik dalam aspek pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah tumbuh selaras dengan peningkatan aktifitas dan konsumsi masyarakat daerah. Dari aspek Belanja Daerah, serapan APBD terus membaik akibat terjadinya peningkatan realisasi yang terjadi pada seluruh jenis belanja baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja lainnya. Kinerja fiskal daerah tersebut perlu terus dipertahankan hingga akhir tahun agar perekonomian daerah terus tumbuh.

Sampai dengan akhir Agustus 2023, kinerja pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp205,5 Triliun atau tumbuh 3,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan kinerja PAD utamanya ditopang oleh pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara komposisi, PAD didominasi oleh pendapatan dari pajak daerah (75%), Lain-lain PAD yang sah (17,6%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (4,9%) dan Retribusi Daerah (2,5%).



Per jenis PAD, Pajak Daerah telah mencapai sebesar Rp154,04 Triliun atau tumbuh 9,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Retribusi Daerah sampai dengan Agustus 2023 juga turut tumbuh, mencapai Rp5,15 Triliun atau naik 4,2 % secara y.o.y. Selanjutnya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh 4,0% dibandingkan tahun sebelumnya atau mencapai Rp1,04 Triliun. Sementara itu, Lain-lain PAD yang sah sampai dengan bulan Agustus 2023 masih berkontraksi sebesar 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar Rp36,25 Triliun.

Secara lebih spesifik, kinerja pajak daerah s.d Agustus 2023 menunjukkan semakin tingginya konsumsi masyarakat ini dicerminkan melalui adanya peningkatan persentase realisasi pajak yang bersifat konsumtif seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang menunjukkan semakin bergeliatnya sektor pariwisata.

Selaras dengan tumbuhnya perekonomian regional Bali – Nusra pada Q2 2023 dengan sumber pertumbuhan utama penyediaan akomodasi dan makan minum. Peningkatan realisasi pajak bersifat konsumtif (y.o.y) pada bulan ini juga tercatat paling signifikan terjadi di wilayah Bali-Nusra sebagai wilayah dengan destinasi wisata yang banyak dituju oleh masyarakat. Di wilayah Bali, pendapatan dari pajak hotel mencapai Rp2.38 triliun atau lebih tinggi 240,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Wilayah Nusa Tenggara Timur juga turut mencatatkan realisasi pertumbuhan pajak hotel yang tinggi mencapai Rp53,24 Miliar, atau tumbuh 29,9% dibandingkan tahun lalu. Pada wilayah Nusa Tenggara Barat, realisasi pajak hotel sudah mencapai Rp57,14 Miliar, tumbuh 9,0% y.o.y.

Selain pajak yang terkait konsumsi, beberapa jenis pajak lainnya juga turut tumbuh tinggi dibandingkan tahun lalu antara lain Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (21,1%), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (5,1%) dan Pajak Air Tanah (3,6%).

Selain Pajak Daerah, pertumbuhan Retribusi Daerah s.d Agustus 2023 juga tumbuh yang ditopang oleh peningkatan hasil retribusi perizinan tertentu dan retribusi jasa usaha yang masing-masing tumbuh 50,3% dan 7,2%. Sementara retribusi jasa umum masih berkontraksi 12% dibandingkan dengan tahun lalu. Pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mencatat pertumbuhan sebesar 3,97% yang disebabkan oleh pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal milik swasta (1009,8%) dan bagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal pada BUMD (8,5%). Lain-lain PAD yang sah masih berkontraksi 6,5% dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan pendapatan BLUD (-9,6%) dan penurunan jasa giro (-9,7%).





Dari sisi Belanja Daerah, realisasi sd Agustus 2023 juga menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Serapan belanja daerah sudah mencapai Rp609,24 Triliun atau tumbuh 5,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun apabila dibandingkan dengan pagu dalam APBD 2023, realisasi belanja daerah s.d Agustus 2023 baru sebesar 47,67%. Meskipun sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, kinerja serapan belanja daerah perlu terus di dorong agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

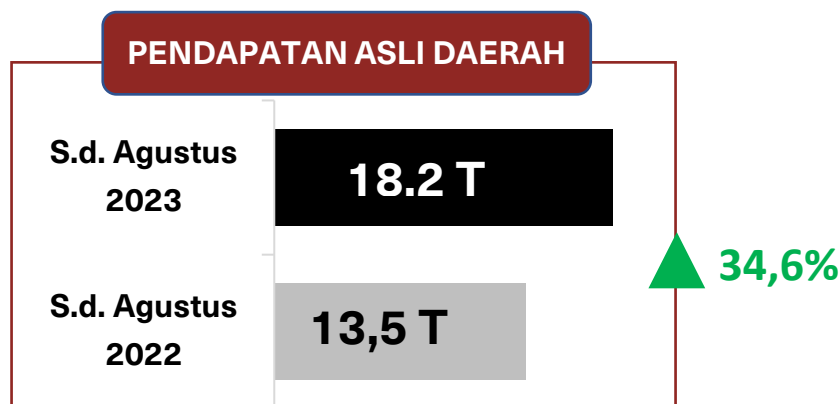
Kinerja serapan yang baik ini ini dikontribusikan dari seluruh jenis belanja. Belanja pegawai tumbuh 1,1% yang disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Belanja Barang dan Jasa tumbuh 6,4% yang disebabkan kenaikan belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjadiin dan belanja jasa kepada pihak ketiga. Belanja Modal tumbuh 15,2%, karena peningkatan belanja modal jalan dan jembatan, bangunan gedung, bangunan air, alat kantor dan rumah tangga. Belanja Lainnya tumbuh 7,7%, karena peningkatan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, belanja bagi hasil pajak daerah kepada kab/kota dan desa, serta belanja hibah kepada badan/Lembaga/ormas berbadan hukum.

Berbagai peningkatan tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan realisasi belanja fungsi ekonomi, fungsi perlindungan sosial (perlinsos) dan fungsi fungsi kesehatan yang tumbuh dibandingkan tahun lalu (y.o.y) masing 7,8%, 3,2%, dan 6,3%, selaras perbaikan kinerja serapan dan peningkatan aktifitas ekonomi di daerah. Pertumbuhan kinerja per fungsi ini menunjukkan dukungan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan akses layanan kesehatan dan dukungan pemberian bantuan kepada masyarakat.



KINERJA APBD PULAU KALIMANTAN

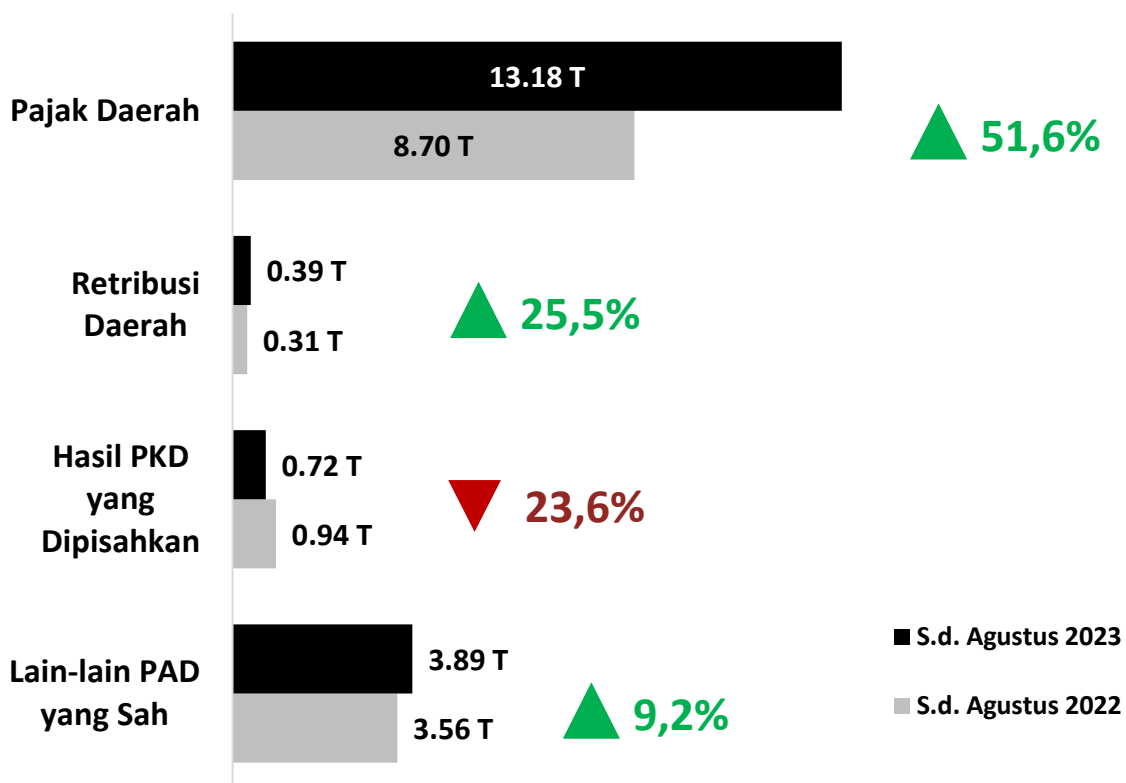
Pada wilayah pulau Kalimantan yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Kinerja PAD Pulau Kalimantan per Agustus 2023 sebesar Rp18,1 Triliun, lebih tinggi 34,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan kinerja PAD tersebut utamanya dikontribusikan dari peningkatan pendapatan pajak daerah sebesar 51,6% diikuti pendapatan retribusi daerah 25,5% dan lain-lain PAD yang sah 9,2% sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontraksi 23,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Secara proporsi, sekitar tiga perempat dari PAD merupakan pajak daerah (72,5%), lain-lain PAD yang sah sebesar 21,4% sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan retribusi daerah hanya masing-masing 4,0% dan 2,2% dari proporsi PAD.



Per jenis pajak daerah, pertumbuhan pajak daerah tertinggi di pulau Kalimantan sampai dengan Agustus 2023 utamanya berasal dari pajak-pajak terkait kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Tertinggi merupakan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang tumbuh 124% YoY diikuti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan pertumbuhan 73,2% dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tumbuh 57,8%. Pertumbuhan pajak terkait kendaraan bermotor tersebut dapat menandakan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di pulau Kalimantan. Selain itu, hal ini juga turut mengindikasikan meningkatnya compliance dalam pembayaran pajak dimana pemerintah telah mengadopsi pendekatan pajak yang lebih efektif dalam mengumpulkan pajak dari pemilik kendaraan, seperti penggunaan teknologi/digitalisasi untuk memantau dan mengelola pembayaran pajak.

Selain pajak terkait dengan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor, pertumbuhan pajak daerah di pulau Kalimantan juga ditopang oleh pajak konsumtif seperti pajak hiburan yang tumbuh 28,0%, pajak restoran tumbuh 19,2%, pajak hotel tumbuh 17,3% dan pajak parkir dengan pertumbuhan 11,6% secara Y.o.Y.

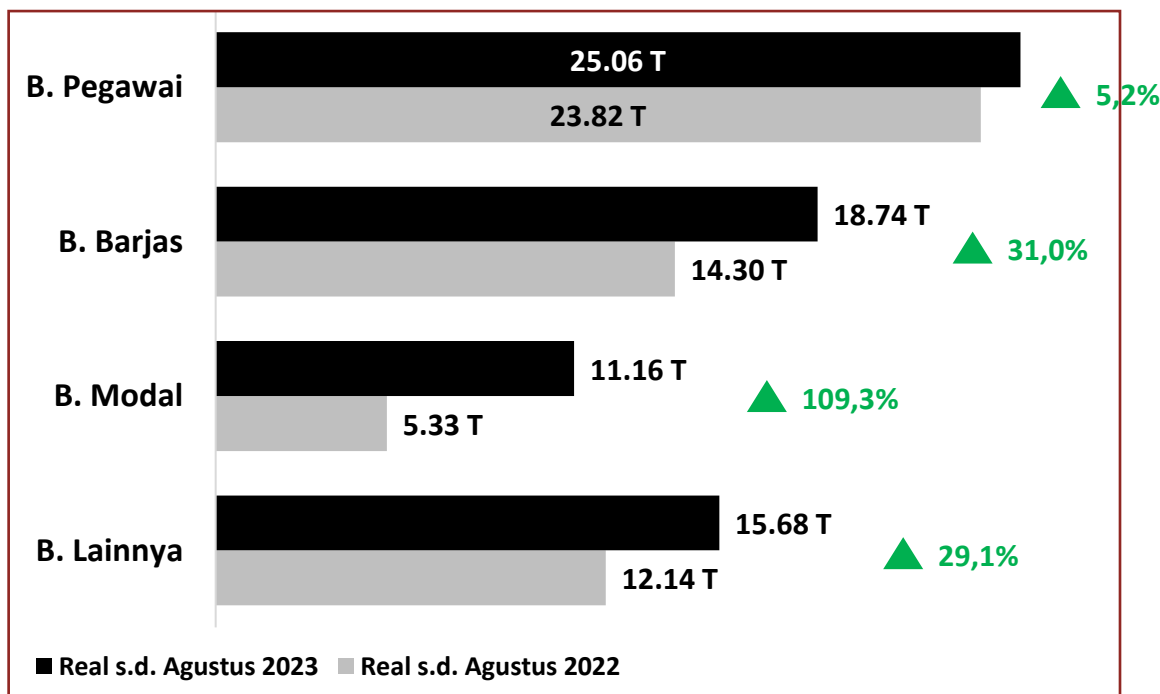
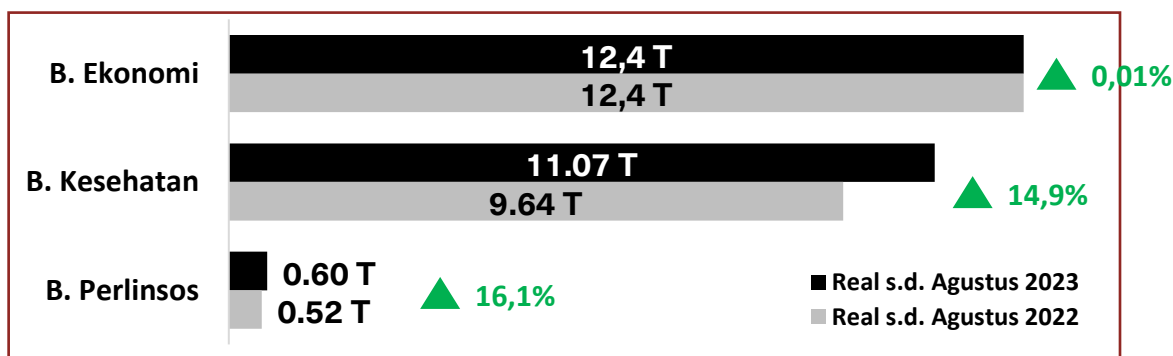
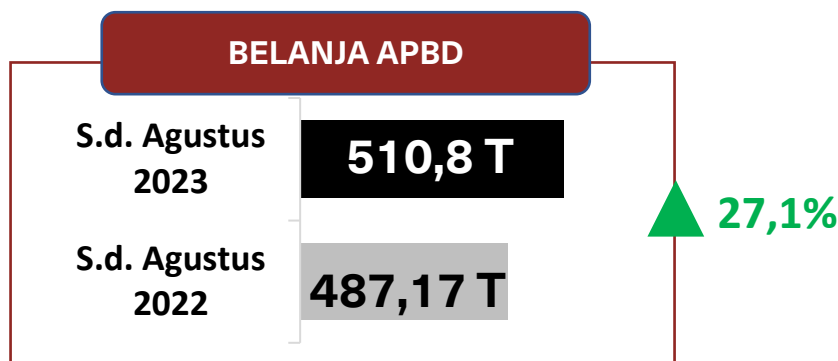
Kinerja perpajakan daerah perlu terus dioptimalkan antara lain terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang melambat kinerjanya 1,6% dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang turun 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua jenis pajak ini kiranya mengindikasikan (proxy) dari aktivitas investasi dimana apabila dapat terus ditingkatkan akan dapat mendorong pertumbuhan regional.



Dari sisi belanja, pulau Kalimantan juga mencatatkan kinerja positif. Belanja APBD s.d Agustus 2023 sebesar Rp70,6 Triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja pulau Kalimantan hanya mencatat sebesar Rp55,5 Triliun. Terjadi pertumbuhan kinerja realisasi belanja yang sangat baik yaitu sebesar 27,1% YoY. Pertumbuhan realisasi belanja yang sangat baik ini ditopang oleh seluruh jenis belanja daerah. Belanja Pegawai tumbuh 5,2% yang disebabkan karena kenaikan realisasi belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, tambahan penghasilan ASN, belanja gaji dan tunjangan. Belanja Barang dan Jasa tumbuh 31% yang dikontribusikan dari peningkatan realisasi belanja barang, belanja uang dan/atau jasa kepada pihak ketiga, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Belanja Modal juga tumbuh sangat tinggi mencapai 109,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan yang sangat tinggi ini utamanya dikarenakan peningkatan realisasi pada belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan Gedung, belanja modal bangunan air, belanja modal alat kantor dan rumah tangga serta belanja modal alat angkutan serta belanja modal komputer. Kinerja realisasi belanja modal yang sangat tinggi di pulau Kalimantan dapat mengindikasikan potensi pertumbuhan ekonomi yang positif pada regional tersebut dari belanja modal yang akan bertransmisi kepada investasi di daerah. Namun peningkatan realisasi belanja modal tersebut juga harus diimbangi dengan kebijakan yang pro-growth dan perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa investasi dari belanja modal tersebut memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi ekonomi dan masyarakat. Pada jenis belanja lainnya, pertumbuhan kinerja realisasi tercatat sebesar 29,1% YoY. Hal ini disebabkan antara lain oleh meningkatnya kinerja belanja subsidi, belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kab/kota, belanja hibah dan belanja bantuan sosial kepada individu.

Kinerja belanja per fungsi di pulau Kalimantan sd Agustus 2023, khususnya terkait belanja fungsi ekonomi, Kesehatan dan perlinsos juga mengalami peningkatan. Realisasi belanja fungsi ekonomi pada periode ini sebesar Rp12,4 Triliun atau tumbuh 0,01% dari periode yang sama tahun lalu. kinerja realisasi belanja fungsi Kesehatan sebesar Rp11,0 Triliun atau meningkat 14,9% dan realisasi belanja fungsi perlinsos sebesar 16,1% atau sebesar Rp0,59 Triliun. Kinerja realisasi belanja pulau Kalimantan yang sudah baik tersebut perlu terus dioptimalkan hingga akhir tahun. Hal ini penting agar realisasi tidak menumpuk pada akhir tahun sehingga tidak terjadi penundaan atau kurang optimalnya layanan publik akibat dari eksekusi belanja yang terlambat.





REFORMASI STRUKTURAL WILAYAH KALIMANTAN

Amelia Imanda Yusuf dan Rian Kelana Ednur

Sebagaimana tajuk sebelumnya, keberhasilan reformasi struktural di Indonesia, salah satunya ditentukan oleh keberhasilan reformasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa reformasi struktural di Pemda berjalan dengan baik, penting untuk melakukan pemantauan reformasi sektoral ini secara regional. Kemudian, kita juga dapat mengukur keunggulan kompetitif suatu daerah terhadap daerah yang lainnya, dan dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Di tajuk kali ini, kita akan melakukan ulasan lebih dalam mengenai reformasi struktural untuk region Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Jawa dan Sumatera, serta memiliki wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Pulau Kalimantan juga merupakan pulau dengan sumber mineral yang melimpah.

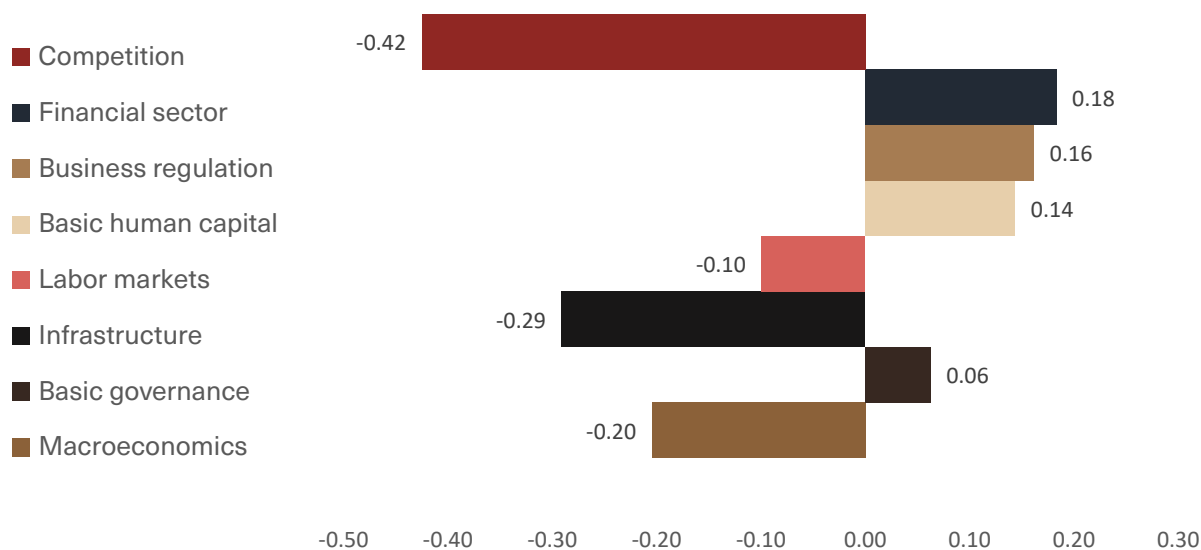
Mekanisme yang digunakan untuk menilai reformasi struktural daerah adalah dengan melihat *z-score* yang menggambarkan data simpangan dari nilai rata-rata yang telah diukur dengan standar deviasinya. *Z-score* yang positif menggambarkan nilai yang lebih tinggi dari rata-rata, demikian pula sebaliknya, *z-score* yang negatif menggambarkan nilai yang lebih rendah dari rata-rata. Adapun variabel yang digunakan dalam penyusunan *z-score* ini adalah:

- a. *Macroeconomics*, yang dinilai dari variable tingkat inflasi daerah. Menggunakan data inflasi tahun 2022 yang bersumber dari BPS
- b. *Basic governance*, yang direpresentasikan dari Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Men PANRB, terakhir menggunakan data tahun 2021
- c. *Infrastructure*, dari indeks pelayanan public bidang infrastruktur. Indeks ini disusun oleh DJPK dengan menggunakan variable antara lain kondisi jalan mantap, kualitas internet, cakupan listrik, dll. Indeks ini menggunakan data terakhir yaitu tahun 2023

- a. *Basic human capital* yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel ini bersumber dari BPS dan menggunakan data terakhir, yaitu IPM tahun 2022
- b. *Business Regulation*, yang digambarkan dengan indeks kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bersumber dari BKPM dan menggunakan data tahun 2022.
- c. *Labor markets*, digambarkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang bersumber dari BPS dan terakhir menggunakan data tahun 2022.
- d. *Financial sector* yang digambarkan oleh pinjaman yang diberikan kepada masyarakat untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi serta pemberian kredit kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Data ini bersumber dari Bank Indonesia dengan menggunakan data tahun 2022
- e. *Competition* yang digambarkan dengan Indeks Daya Saing Daerah. Indeks ini bersumber dari BRIN yang dapat menggambarkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota serta faktor-faktor pendorongnya diantaranya adalah aspek infrastruktur. Indeks ini menggunakan data tahun 2022

Secara keseluruhan, reformasi struktural di region Kalimantan menunjukkan kondisi yang berimbang dimana terdapat beberapa aspek yang menunjukkan kinerja yang di atas rata-rata nasional dan di bawah rata-rata nasional.

Region Kalimantan



Aspek *competition* daerah di region Kalimantan menunjukkan angka z-score yang jauh lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu sebesar -0,42. Aspek *competition* direpresentasikan dari Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022, yang diukur dari 12 pilar daya saing. Jika dilihat lebih detil, IDSD yang rendah di region Kalimantan berasal dari pilar ukuran pasar dan kapabilitas inovasi. Ukuran pasar yang relatif lebih rendah di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, menggambarkan kurangnya potensi daerah-daerah tersebut dalam meningkatkan produktivitas dan skala ekonomi. Demikian pula dengan kapabilitas inovasi yang menunjukkan masih rendahnya kuantitas dan kualitas penelitian, padahal hal ini sangat berpengaruh untuk menghasilkan ide-ide, produk, dan model bisnis baru yang dapat mendukung daya saing ekonomi daerah tersebut.



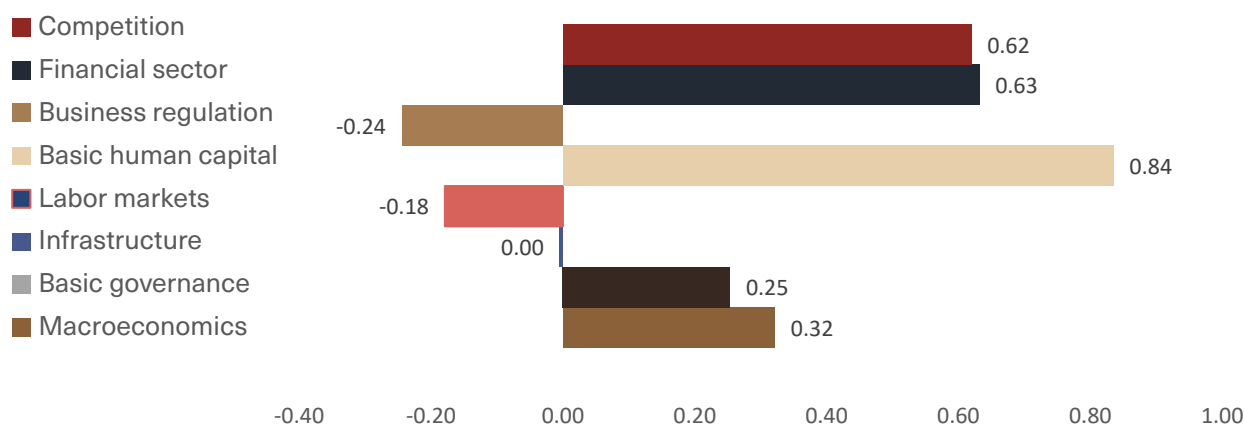
Aspek lain yang juga menunjukkan nilai yang lebih rendah dari rata-rata nasional adalah aspek *infrastructure*, yaitu lebih rendah -0,29 dari rata-rata nasional. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan memiliki tantangan yang besar terutama karena kondisi geografisnya yang didominasi kontur pegunungan dan hutan tropis yang sulit dijangkau, sehingga dibutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun, dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas infrastruktur yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain *competition* dan *infrastructure*, aspek *macroeconomics* juga memiliki simpangan negatif yang lebih rendah yaitu sebesar -0,2. Hal ini dapat dipengaruhi juga oleh infrastruktur yang kurang memadai yang dapat menghambat distribusi barang dan layanan, sehingga biaya logistik menjadi lebih tinggi dan dapat memicu inflasi.

Sementara itu, aspek *financial sector* yang diukur dari besaran pinjaman dan kredit UMKM memiliki simpangan positif dari rata-rata nasional. Untuk tingkat provinsi, total besaran pinjaman dan kredit UMKM tertinggi pada Provinsi Kalimantan Timur (pinjaman ke masyarakat sebesar Rp162,6 triliun dan kredit UMKM sebesar Rp28 triliun) sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota tertinggi pada Kota Balikpapan (pinjaman ke masyarakat sebesar Rp49,4 triliun dan kredit UMKM sebesar Rp6,7 triliun).

Kemudian, untuk aspek-aspek yang terkait dengan pelayanan seperti *business regulation* dan *basic governance* memiliki z-score yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini terlihat dari tingginya rata-rata indeks kinerja PTSP dan Indeks Reformasi Birokrasi di region Kalimantan dengan nilai sebesar 68,40 dan 55,84 untuk masing-masing. Adapun nilai rata-rata nasional untuk indeks kinerja PTSP adalah sebesar 65,38 dan sebesar 55,27 untuk rata-rata nasional terhadap indeks reformasi birokrasi.

Prov. Kalimantan Timur

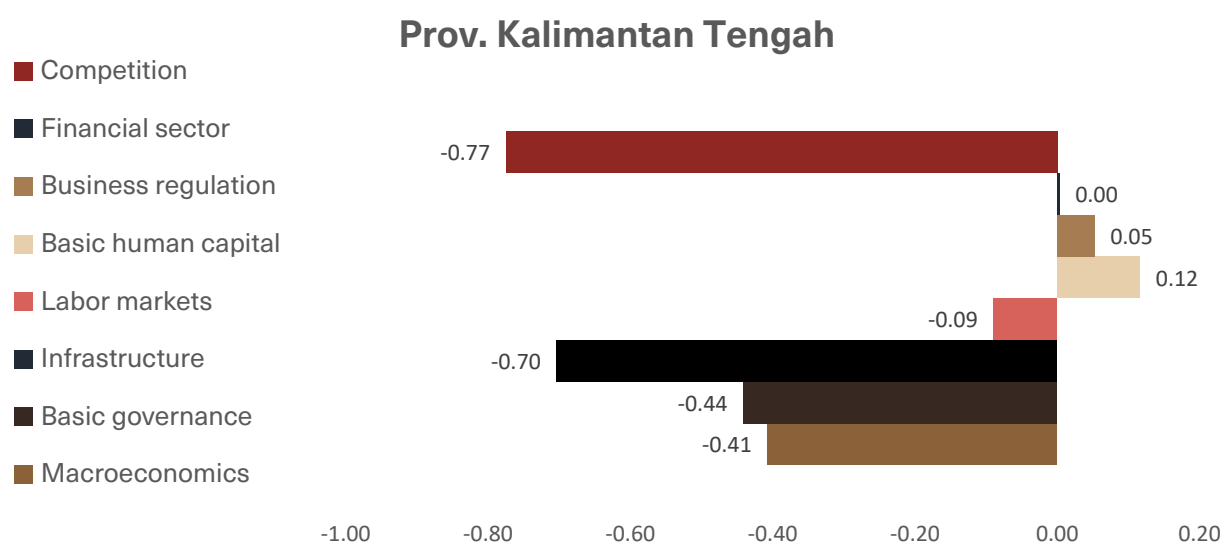


Dari 5 provinsi di region Kalimantan, secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan provinsi lainnya. Mayoritas aspek reformasi struktural memiliki nilai *z-score* yang lebih baik dari rata-rata nasional.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,48 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,55 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai Rp921,33 triliun, lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di region Kalimantan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di daerah ini, memberikan dampak kepada kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan masyarakat lainnya, hal ini tergambar pada aspek *basic human capital* yang memiliki simpangan positif cukup besar dari rata-rata nasional yaitu sebesar 0,84.

Daya saing di wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga tertinggi di bandingkan provinsi-provinsi lainnya di region Kalimantan yang mayoritas bahkan memiliki simpangan negatif (Provinsi Kalimantan Barat -0,85; Provinsi Kalimantan Tengah -0,77; Provinsi Kalimantan Selatan -0,37).

Hal ini dapat dipicu dari pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong peningkatan investasi, keterbukaan pasar, lapangan kerja yang lebih luas, dan ketersediaan teknologi dan informasi. Demikian pula dengan penguatan sektor perbankan di wilayah ini, dimana besaran pinjaman masyarakat dan jumlah kredit UMKM yang tertinggi adalah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan total sebesar Rp190,6 triliun.



Sementara, Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan performa yang paling rendah dibandingkan provinsi lain di region Kalimantan. Sebagian besar aspek memiliki nilai *z-score* yang lebih rendah dari rata-rata nasional, dengan simpangan yang cukup besar, terutama pada aspek *infrastructure* dan *competition*.

Berdasarkan data BPS, PDRB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp199,9 triliun, hanya seperlima dari PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Terlebih dengan kondisi geografis Provinsi Kalimantan Tengah yang cukup luas (tertinggi kedua setelah Provinsi Papua, berdasarkan Permendagri 72 Tahun 2019) menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pemerataan pembangunan, khususnya pembangunan infastruktur. Hal ini sejalan dengan besaran *z-score infrastructure* yang lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar -0,70.

Lebih lanjut, dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, akan berpengaruh pada keterbatasan sumber daya untuk melakukan investasi, inovasi, perbaikan layanan, dan peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing daerah yang cukup rendah dibanding rata-rata nasional, yaitu sebesar -0,77.



Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa region Kalimantan mempunyai potensi yang tinggi untuk dapat lebih berkembang namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi salah satunya adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur di seluruh region Kalimantan. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang terjadi di region Kalimantan masih tinggi menyerupai kondisi nasional yang didominasi oleh region Jawa melalui Produk Domestik Bruto (PDB)-nya, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi yang memberikan kontribusi lebih dari separuh pada nilai PDRB di region Kalimantan. Dominasi Provinsi Kalimantan Timur ini juga berdampak pada ketidakmerataan aspek reformasi struktural lainnya yang menjadi PR besar bagi pemerintah pusat untuk dapat mendorong pemerataan pembangunan di region Kalimantan.





KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Ananta Sugiyarto dan Efriyazwar

Indeks Kesehatan

Pelayanan publik kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan salah satu aspek kunci dari tugas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam melindungi hak masyarakat atas kesehatan yang layak. Pelayanan publik kesehatan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan akses yang mudah ke perawatan medis, vaksinasi, edukasi kesehatan masyarakat, hingga respons terhadap wabah penyakit dan krisis kesehatan. Pelayanan kesehatan tingkat daerah juga dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi disparitas kesehatan antarwilayah dan memastikan bahwa tidak ada warga yang terpinggirkan dalam akses terhadap perawatan medis. Dalam situasi pandemi seperti yang dialami dengan COVID-19, peran pelayanan publik kesehatan menjadi sangat vital dalam melindungi masyarakat secara keseluruhan dan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, investasi dan perhatian yang tepat pada pelayanan publik kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam menilai kinerja layanan kesehatan di suatu daerah diperlukan suatu indikator yang dapat merepresentasikan kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya sehingga dapat dilakukan komparasi antardaerah untuk menilai kinerja layanan dimaksud. Hal ini karena indikator tersebut menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan.

Dengan memiliki data yang kuat dan relevan tentang indikator-indikator kesehatan seperti harapan hidup, tingkat kematian bayi, balita dengan gizi normal, serta akses ke pelayanan medis. Selain itu, Indikator tersebut juga membantu dalam pemantauan perkembangan seiring waktu, memungkinkan perbandingan antarwilayah. Dengan demikian, indikator tersebut menjadi instrumen penting yang menjadi ukuran dalam upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan layanan kesehatan di suatu daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Kesehatan adalah suatu ukuran statistik yang digunakan dalam rangka membandingkan kondisi bidang kesehatan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kondisi dalam konteks indeks kesehatan diukur dengan menggunakan beberapa indikator output dan intermediate outcome layanan kesehatan yang tersedia di daerah. Indeks Kesehatan secara umum menggambarkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat secara lebih komprehensif.

Manfaat penyusunan Indeks Kesehatan ini diantaranya adalah dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan pelayanan bidang Kesehatan masyarakat di daerah untuk pengambilan keputusan serta pengambilan kebijakan di masa mendatang. Adanya indeks untuk evaluasi pada bidang Kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat di daerah. Selain itu, Indeks Kesehatan yang disusun ini juga digunakan dalam rangka pengalokasian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan.

Adapun kegunaan indeks kesehatan yaitu:

1. Menciptakan suatu ukuran dalam bentuk angka sebagai indikasi cerminan kondisi dan kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan.
2. Mengukur/membandingkan perubahan dari beberapa variabel yang mencerminkan kinerja sektor kesehatan, seperti usia harapan hidup, persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita dengan gizi normal, dan balita dengan imunisasi lengkap.
3. Melakukan perbaikan kebijakan di sektor kesehatan berdasarkan angka/indeks yang lebih praktis dan mudah dibaca dan dibandingkan dengan capaian indikator (Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem) yang tersedia untuk menarik kesimpulan hubungan antara Indeks Kesehatan dan Indikator-indikator tersebut.

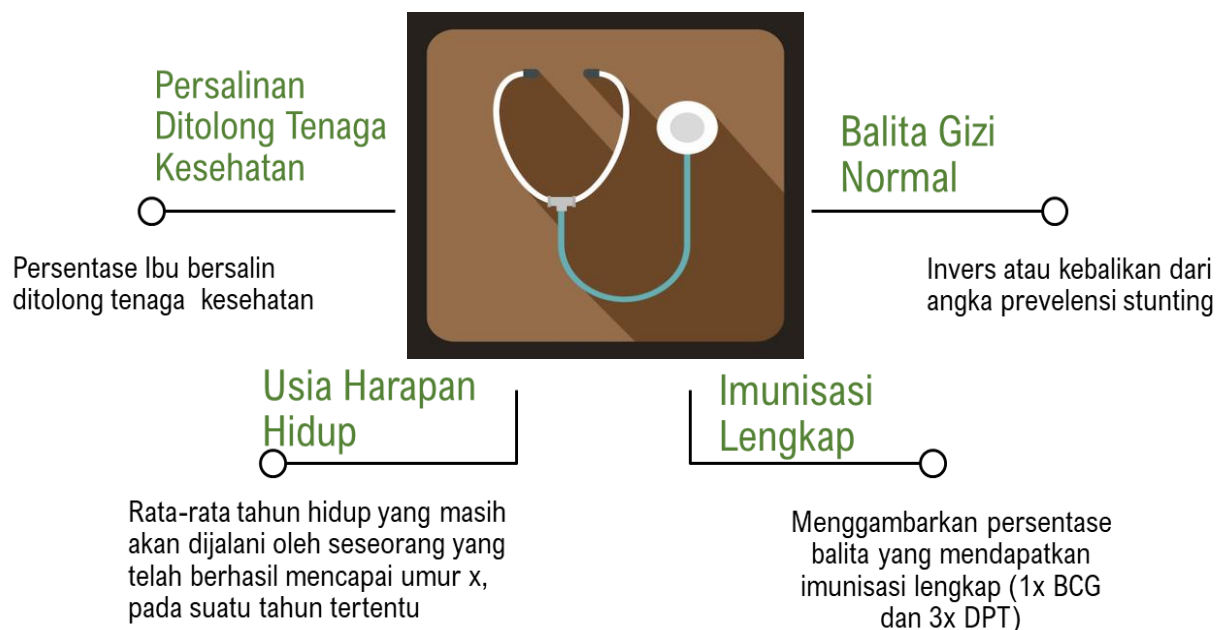


Penyusunan Indeks Kesehatan

Kerangka konseptual unsur pembentuk indeks kesehatan dapat dilihat pada Gambar 1. Variabel yang digunakan dalam penyusunan indeks merupakan indikator yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat di daerah. Metode pemilihan variabel yang digunakan dalam penyusunan Indeks mengacu pada variabel yang umum dilaporkan oleh *World Health Organization* (WHO) dalam hal ini adalah:

- Usia harapan hidup, yang sebelumnya dikenal dengan Angka Harapan Hidup adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya
- Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap, menggambarkan balita yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap yang terdiri dari 1 kali BCG (*Bacillus Calmette Guerin*), 3 kali DPT (difteri, partusis, dan tetanus), dan hepatitis B.
- Balita dengan gizi normal, yaitu invers atau kebalikan dari angka prevelensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah usia lima tahun, dan dinyatakan dalam bentuk persen dan
- Persalinan ditolong tenaga kesehatan, yaitu perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase.

Gambar 1. Variabel Pembentuk Indeks Kesehatan



Selain itu, dalam penelitiannya, menggunakan data *Demographic and Health Survey* tahun 2008-2017 di 12 negara Afrika Timur, Tessema & Tesema (2020) menyatakan bahwa umur, pendidikan, *wealth index*, dan tempat tinggal merupakan beberapa penentu utama persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

Untuk mendapatkan hasil Indeks Kesehatan dilakukan dengan *Principal Component Analysis* (PCA). Analisis ini menggunakan *cross-section* data pada 542 Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2020. Variabel yang digunakan untuk menghitung indeks kesehatan pada level provinsi dan kabupaten/kota yaitu: usia harapan hidup, persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita dengan gizi normal, dan balita dengan imunisasi lengkap.

Hasil Analisis Indeks Kesehatan

Tabel 1. Sebaran Indeks Kesehatan

Variabel	Obs	Mean	St. Dev	Min	Max
Indeks Provinsi	34	93.30	3.41	86.70	100.00
Indeks Kab/Kota	508	89.51	4.54	70.77	100.00

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, indeks kesehatan bernilai 70,77-100, yang mana nilai 100 merupakan daerah dengan kondisi terbaik dibandingkan dengan daerah lain. Semakin tinggi nilai indeks kesehatan suatu daerah, maka semakin baik tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Rata-rata indeks pada level provinsi sebesar 93,30 dan pada level kabupaten/kota sebesar 89,51.

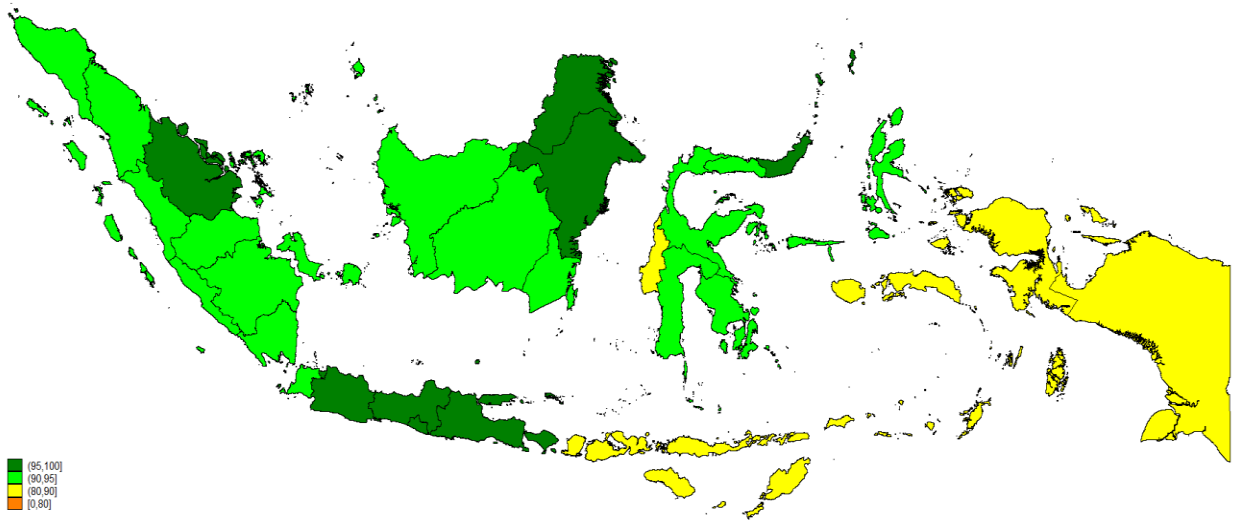
1. Gambaran Indeks Kesehatan Provinsi

Berdasarkan sebaran indeks pada 34 provinsi, adanya kecenderungan provinsi dengan indeks tinggi berada di wilayah barat, sementara provinsi dengan nilai indeks rendah berada di wilayah timur dan sebagian di tengah. Untuk regional Kalimantan, provinsi memiliki nilai indeks tinggi dan sangat tinggi dengan nilai rerata sebesar 94,83 lebih besar bila dibandingkan dengan rerata provinsi secara nasional.

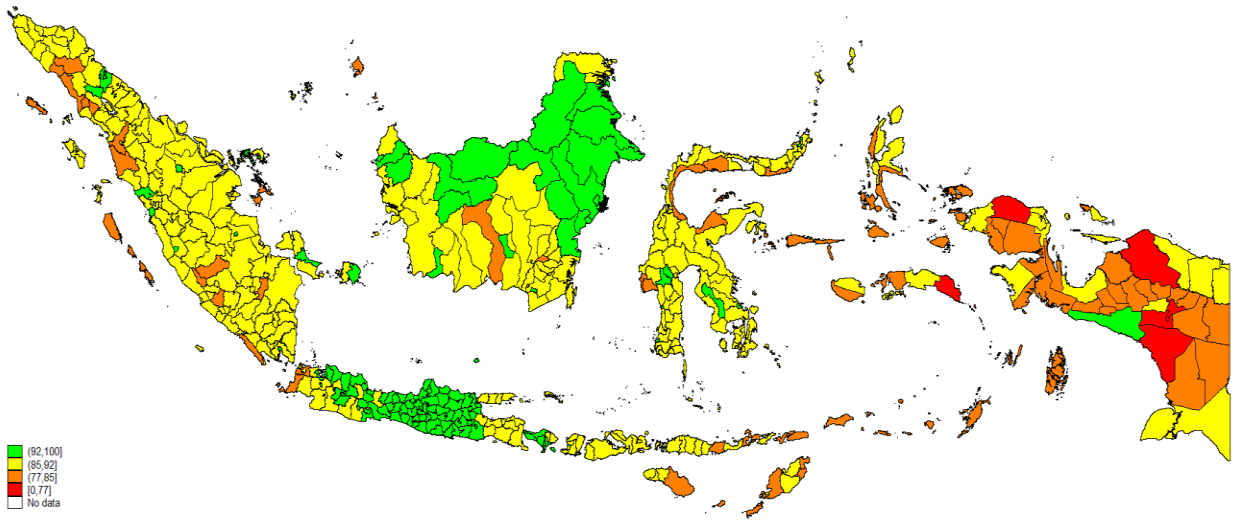
2. Gambaran Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota

Berdasarkan sebaran indeks pada 415 kabupaten, didapatkan rata-rata indeks kesehatan sebesar 88,78 sementara sebaran indeks pada 93 kota didapatkan rata-rata kesehatan sebesar 92,76. Melihat kondisi tersebut, wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Untuk regional Kalimantan, rata-rata indeks kesehatan di level kabupaten sebesar 90,30 dan rata-rata indeks kesehatan di level kota sebesar 94,26 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks kabupaten dan kota secara nasional. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan di wilayah kota dan wilayah kabupaten di regional Kalimantan lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Gambar 2. Peta Indeks Kesehatan Provinsi



Gambar 3. Peta Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota



3. Indeks Kesehatan Tertinggi dan Terendah

No.	Provinsi		Kabupaten		Kota	
	Pemda	Indeks	Pemda	Indeks	Pemda	Indeks
1	DI Yogyakarta	100.00	Sukoharjo	100.00	Salatiga	99.79
2	Jawa Tengah	99.15	Karanganyar	99.86	Semarang	99.58
3	Kalimantan Timur	98.99	Klaten	99.05	Surakarta	99.57
4	Jawa Barat	97.20	Kudus	98.62	Magelang	99.11
5	DKI Jakarta	97.17	Pati	98.38	Bekasi	96.50

Tabel 3. Pemda dengan Indeks Kesehatan Terendah

No.	Provinsi		Kabupaten		Kota	
	Pemda	Indeks	Pemda	Indeks	Pemda	Indeks
1	Sulawesi Barat	86.70	Nduga	70.77	Tanjung Balai	81.38
2	Papua	87.24	Mamberamo Raya	73.82	Subulussalam	82.03
3	Maluku	87.76	Asmat	74.12	Tual	84.45
4	Papua Barat	87.94	Seram Bagian Timur	75.93	Pagar Alam	86.02
5	Nusa Tenggara Barat	88.85	Jayawijaya	76.57	Cilegon	86.12

Pada level provinsi, nilai indeks kesehatan tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar 100, sementara indeks terendah adalah sebesar 86,70 yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Pada level kabupaten/kota, nilai indeks tertinggi adalah sebesar 100 yang didapat Kab. Sukoharjo Aceh, sementara indeks terendah adalah Kab. Nduga sebesar 70,77. Disparitas antara tertinggi dan terendah pada level provinsi sebesar 13,30 dan pada level kabupaten/kota sebesar 29,23. Besarnya disparitas tertinggi dan terendah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan ketimpangan kesehatan yang lebih tinggi antar wilayah kabupaten/kota dibandingkan dengan antar wilayah provinsi.

Tabel 4. Pemda dengan Indeks Kesehatan Tertinggi di Regional Kalimantan

No.	Provinsi		Kabupaten		Kota	
	Pemda	Indeks	Pemda	Indeks	Pemda	Indeks
1	Kalimantan Timur	95.03	Bengkayang	95.04	Balikpapan	96.07
2	Kalimantan Utara	93.35	Kutai Timur	94.13	Bontang	95.86
3	Kalimantan Barat	84.61	Landak	93.85	Samarinda	95.76
4	Kalimantan Tengah	87.84	Kutai Barat	93.83	Tarakan	95.36
5	Kalimantan Selatan	91.87	Bulungan	93.55	Palangkaraya	94.23

Tabel 4. Pemda dengan Indeks Kesehatan Terendah di Regional Kalimantan

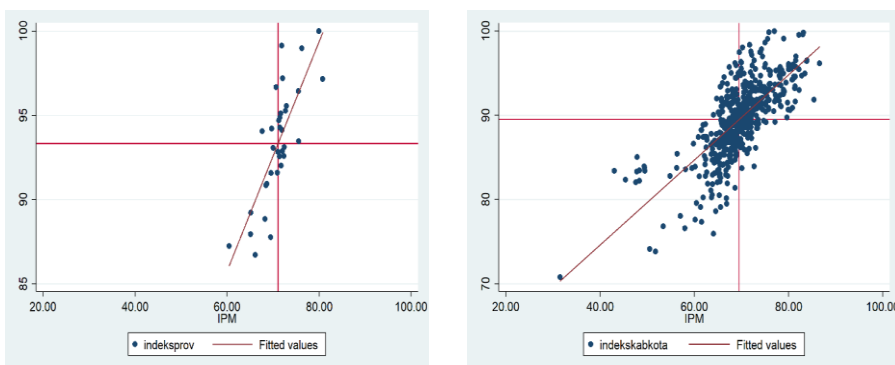
No.	Kabupaten		Kota	
	Pemda	Indeks	Pemda	Indeks
1	Kab. Hulu Sungai Utara	82.58	Kota Banjarmasin	91.65
2	Kab. Katingan	84.74	Kota Singkawang	92.74
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	85.18	Kota Banjarbaru	92.81
4	Kab. Barito Kuala	85.53	Kota Pontianak	93.87
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	85.55	Kota Palangkaraya	94.23

Pada level provinsi di regional Kalimantan, nilai indeks kesehatan tertinggi dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 95,03, sementara indeks terendah berada di provinsi Kalimantan Selatan sebesar 91,87. Pada level kabupaten/kota, nilai indeks kesehatan tertinggi sebesar 96,07 didapat Kota Balikpapan, sedangkan nilai indeks kesehatan terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 82,58. Disparitas tertinggi dan terendah untuk level kabupaten/kota di regional Kalimantan lebih tinggi yaitu sebesar 13,49 dibanding untuk level provinsi yaitu sebesar 3,16. Hal ini menunjukkan ketimpangan kesehatan antar wilayah di level kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan antar wilayah di level provinsi di regional Kalimantan.

4. Hubungan Indeks Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia

IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standar hidup layak (Sirusa BPS). *Robustness check* indeks kesehatan terhadap IPM memiliki hubungan yang positif baik pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Artinya, semakin tinggi indeks kesehatan di suatu daerah maka semakin tinggi pula IPM daerah tersebut. Daerah dengan kualitas pelayanan Kesehatan yang baik akan selaras dengan standar kehidupan yang layak dan pembangunan manusia pada daerah tersebut.

Gambar 4 Indeks Kesehatan dengan IPM



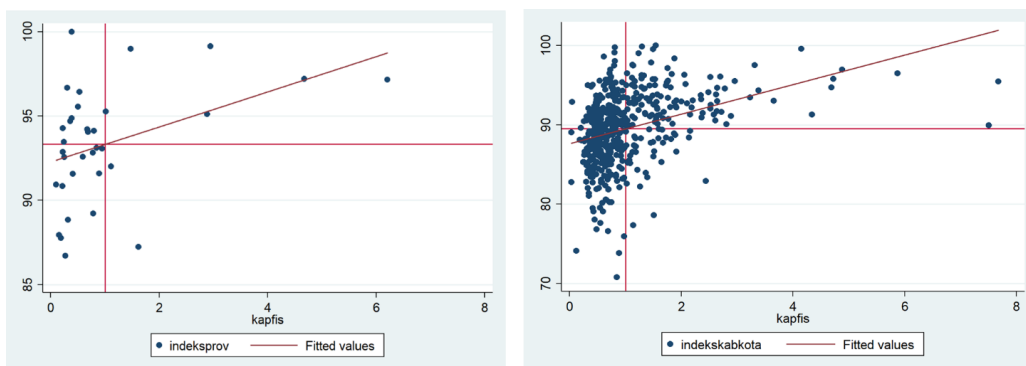
5. Hubungan Indeks Kesehatan dengan Indeks Kapasitas Fiskal

Pada pemetaan indeks Kesehatan dan indeks kapasitas fiskal, terlihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang positif. Artinya, secara umum semakin tinggi indeks Kesehatan maka semakin tinggi pula indeks kapasitas fiskal.

Berdasarkan kuadran yang ditampilkan pada dua grafik sebelumnya, secara umum, sebagian besar daerah berada di kuadran III, di mana memiliki indeks kapasitas fiskal rendah begitu juga indeks kesehatannya. Provinsi, kabupaten, atau kota yang terletak di kuadran III yang seharusnya mendapatkan prioritas intervensi kebijakan dan alokasi anggaran yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, begitu juga sebaliknya daerah dengan indeks kapasitas fiskal tinggi dan indeks kesehatan tinggi yang berada pada kuadran I seyogyanya dapat mempertahankan prestasinya dan patut untuk mendapat apresiasi.

Untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi tetapi masih memiliki indeks kesehatan yang rendah, maka perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pada pemerintah tersebut untuk lebih mengalokasikan pendapatan dan fokus kepada perbaikan dan peningkatan pembangunan sektor kesehatan.

Gambar 5 Indeks Kesehatan dengan Indeks Kapasitas Fiskal



Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil analisis pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara komparatif, indeks kesehatan pemda provinsi baik secara nasional maupun di regional Kalimantan di Indonesia jauh lebih merata dibandingkan dengan indeks kesehatan antar kabupaten/kota. Hal ini terlihat salah satunya dari selisih antara peraih nilai indeks tertinggi dan terendah di provinsi sebesar 13.3 poin secara nasional dan 3,16 poin di regional Kalimantan dibandingkan dengan selisih untuk Kabupaten/Kota sebesar 29.24 poin di tingkat nasional dan 13,49 poin di regional Kalimantan.

2. Rerata indeks kesehatan provinsi secara nasional sebesar 93.32 lebih baik dibandingkan dengan rerata indeks kesehatan Kabupaten/Kota sebesar 89.51 secara nasional, sedangkan rerata indeks kesehatan provinsi di regional Kalimantan sebesar 94,83 juga lebih baik dibandingkan dengan rerata indeks kesehatan Kabupaten/kota di regional Kalimantan sebesar 90,94.
3. Dilihat dari pembagian kuadran indeks kesehatan, porsi terbanyak masih berada di kuadran III, artinya masih banyak daerah yang memiliki baik indeks kesehatan maupun kapasitas fiskal di bawah rata-rata nasional. Bottom of Form
4. Terlihat dari pemetaan kuadran baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota, terdapat korelasi yang positif antara indeks kesehatan dan kapasitas fiskal. Artinya, secara umum semakin tinggi indeks Kesehatan maka semakin tinggi pula indeks kapasitas fiskal.

Dari simpulan tersebut dapat diusulkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kuadran I (kanan atas), menandakan bahwa daerah memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan indeks kesehatan yang tinggi pula, artinya untuk daerah ini telah memberikan performa yang cukup baik sehingga patut untuk terus dilanjutkan.
2. Performa daerah-daerah di kuadran II dalam bidang kesehatan cukup memukau, mengingat dengan kapasitas fiskal yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan daerah di kuadran I, daerah-daerah ini mampu menyediakan layanan kesehatan yang sebanding sehingga dapat di apresiasi dan disarankan agar untuk dapat terus dipertahankan.
3. Kuadran III (kiri bawah) memiliki jumlah daerah yang paling banyak dibandingkan dengan kuadran lain. Kuadran ini menunjukkan daerah-daerah yang indeks kesehatan dan kapasitas fiskal nya berada di bawah rata-rata nasional. Oleh sebab itu, daerah pada kuadran 3 dapat diprioritaskan untuk mendapatkan intervensi kebijakan dan alokasi anggaran misalnya diberikan DAK Kesehatan yang mencukupi agar dapat mengejar ketertinggalan capaian bidang Kesehatannya.
4. Untuk daerah kuadran IV (kanan bawah), yakni daerah dengan indeks kapasitas fiskal tinggi namun indeks Kesehatan rendah, dapat dilakukan sosialisasi agar kekuatan fiskal di daerahnya diprioritaskan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas belanja kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan.





KAJIAN KHUSUS

Optimalisasi Belanja Daerah terkait Stunting untuk Percepatan Penurunan Stunting di daerah

Adi Saputra dan Arifudin Miftahul Huda

Pendahuluan

Stunting adalah masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Stunting terjadi ketika pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak terhambat akibat kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhan pertama mereka. Dampaknya bukan hanya terbatas pada tinggi badan rendah, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan perkembangan anak di kemudian hari. Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas utama di tingkat pemerintah daerah di Indonesia.

Stunting merupakan prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, dimana target penurunan stunting di tahun 2024 adalah sebesar 14%. Untuk mewujudkan target tersebut diperlukan kerjasama semua pihak karena penanganan stunting melibatkan peranan semua stakeholders, termasuk didalamnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam percepatan penurunan stunting karena pemerintah daerah memiliki instrumen berupa belanja APBD yang apabila dilakukan secara efektif dan efisien akan sangat membantu mempercepat penurunan stunting secara nasional. Oleh karena itu, optimalisasi belanja pemerintah daerah terkait penanganan stunting menjadi hal penting untuk percepatan penurunan stunting. Optimalisasi belanja dalam hal ini merupakan upaya agar belanja yang dilakukan pemda tepat alokasi dan tepat sasaran.



Faktor-faktor penyebab Stunting

Untuk menilai sejauh mana belanja daerah berkontribusi dalam mengatasi masalah stunting, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan stunting dan menghubungkannya dengan penggunaan belanja daerah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Menurut Beal et.al (2018) stunting dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor dalam rumah tangga misalnya kondisi Ibu dan Bayi dimana sang ibu memiliki tinggi badan yang terbilang pendek, kelahiran premature, dan jarak kehamilan yang pendek, kehamilan yang terjadi pada masa remaja, jarak kelahiran yang pendek, Pendidikan orang tua yang rendah, kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, dll. Faktor ketidakcukupan makanan seperti kualitas mikro nutrient yang buruk, keaneka ragaman makanan yang rendah, pemberian vitamin yang jarang dll. Faktor terkait infeksi klinis dan non klinis seperti infeksi enterik (penyakit diare, cacangan), infeksi pernapasan, malaria, dan vaksinasi yang tidak lengkap. Faktor menyusui atau praktik menyusui yang terbatas misalnya ASI tidak eksklusif atau kurang dari 2 tahun. Faktor lingkungan dan sosial seperti akses terhadap layanan kesehatan, kualitas penyediaan layanan kesehatan dll.

Dari berbagai faktor tersebut, kemudian dianalisis apa faktor-faktor utama di Indonesia yang perannya atau hubungannya sangat erat dengan stunting. BKF (2022) mengidentifikasi tiga faktor utama yang paling berhubungan erat dengan stunting di Indonesia. Pertama, kurangnya asupan gizi yang seimbang pada anak-anak selama 1.000 hari pertama kehidupan, dari kehamilan hingga usia 2 tahun, merupakan penyebab utama stunting. Anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup selama periode penting ini cenderung mengalami pertumbuhan fisik yang terhambat. Permasalahan pertama ini kita identifikasi sebagai permasalahan terkait ketersediaan makanan atau asupan gizi. Selanjutnya, di beberapa daerah terpencil atau miskin, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih terbatas. Hal ini termasuk akses ke perawatan maternal selama kehamilan dan persalinan serta layanan kesehatan anak-anak, yang jika terbatas, dapat menghambat perawatan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Permasalahan kedua ini kita identifikasi sebagai permasalahan terkait ketersediaan fasilitas atau layanan kesehatan. Masalah ketiga adalah kondisi sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih, yang dapat memperburuk stunting. Anak-anak yang terpapar oleh infeksi akibat sanitasi yang buruk cenderung mengalami penurunan penyerapan nutrisi dan gangguan pertumbuhan. Permasalahan ketiga ini kita identifikasi sebagai permasalahan terkait ketersediaan akses terhadap sanitasi dan air bersih.



Identifikasi Belanja Daerah terkait Stunting

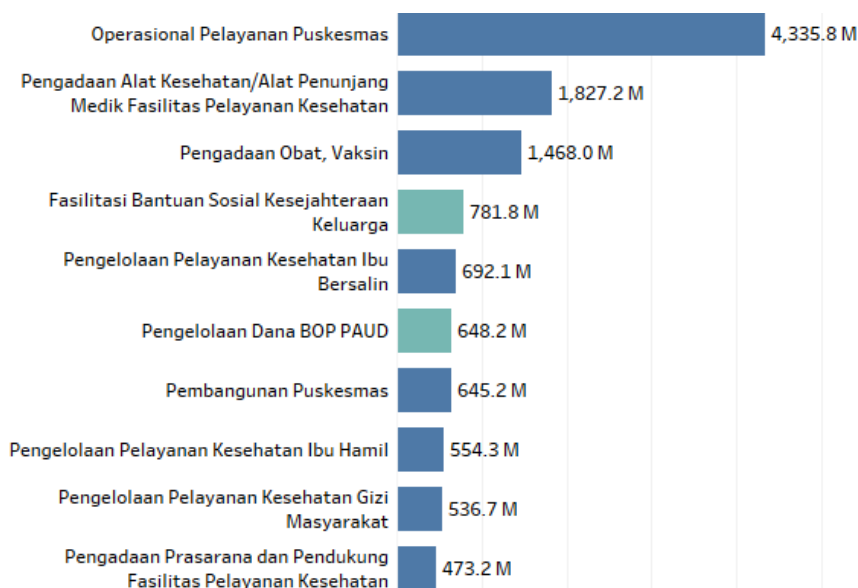
Identifikasi belanja daerah terkait stunting memerlukan upaya tersendiri yang cukup menantang. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pemerintah daerah sendiri tidak memberikan label atau menandai sedari awal suatu program belanjanya untuk tujuan penurunan stunting. Oleh karena itu, diperlukan metode *tracing* belanja-belanja daerah yang sebenarnya ditujukan untuk penanganan stunting namun memang tidak dilabeli sedari awal oleh pemerintah daerah. Metode tracing ini diberi nama metode tagging belanja. Tagging belanja terkait stunting adalah proses mengidentifikasi dan membedakan anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mengatasi atau mencegah masalah stunting di suatu wilayah atau daerah tertentu. Ini melibatkan pengelompokan atau pemberian label pada program-program atau kegiatan yang ditujukan khusus untuk mengurangi tingkat stunting dalam populasi.

Metodologi tagging sendiri merupakan sebuah bahasan yang cukup menarik, dimana hal ini melibatkan peran *Subject Matter Expert* (SME), yaitu Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) dan World Bank. Secara singkat tagging belanja terkait stunting dilakukan dengan sangat hati-hati guna memastikan sub kegiatan yang tertagging stunting **mendapatkan bobot** sesuai dengan keterkaitannya dengan penanganan stunting. Pembobotan ini dilakukan dengan berpedoman pada hasil kajian dengan tema *Budget Analysis for Nutrition: A Guidance Note for Countries*.

Tinjauan data Belanja Daerah terkait Stunting

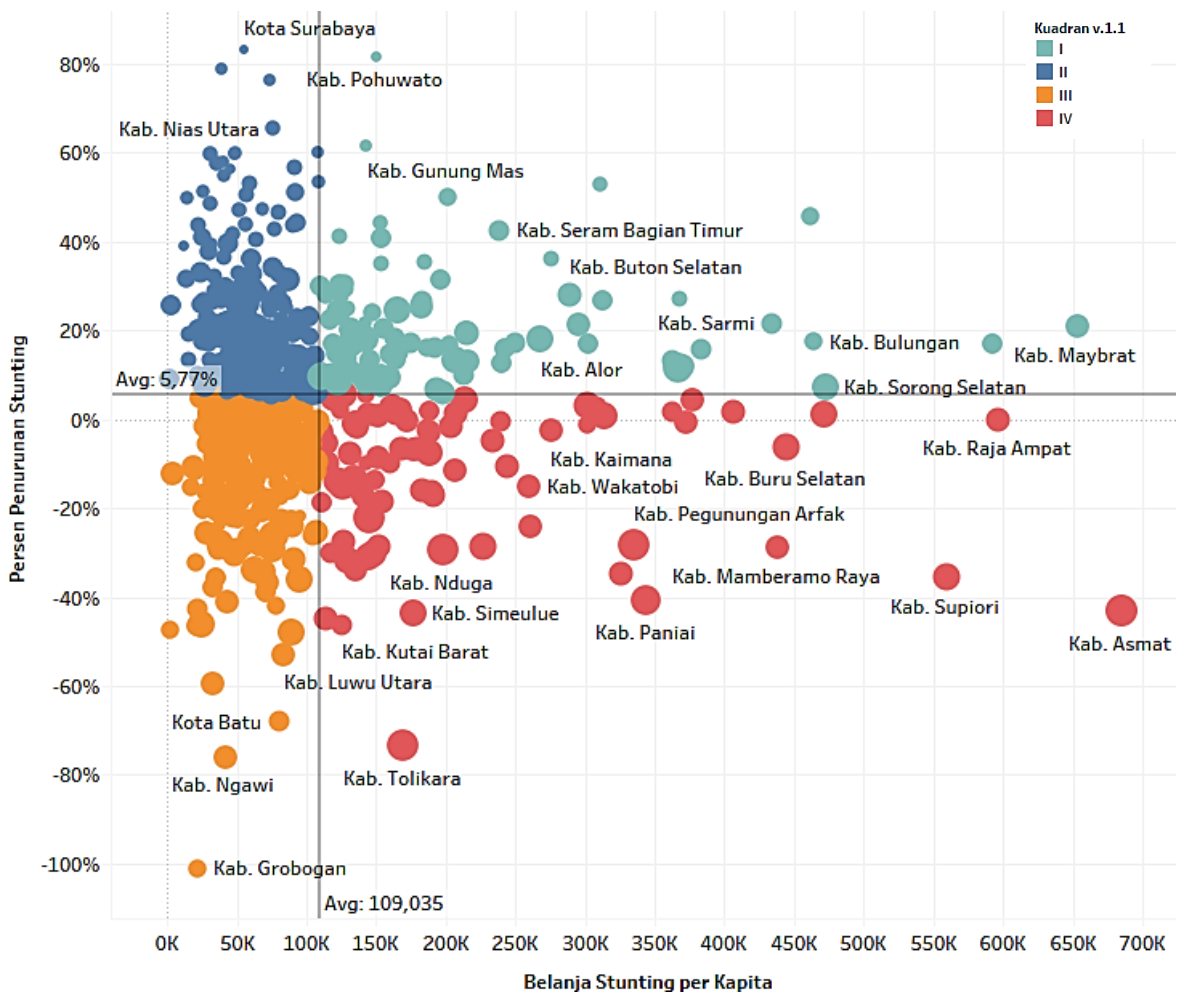
Berdasarkan tagging yang telah dilakukan, anggaran terkait stunting di APBD 2021 adalah sebesar Rp17,44 T yang terdiri dari Rp1,38 T di Provinsi dan Rp16,06 T di Kabupaten/Kota. Berikut merupakan gambaran Top 10 anggaran subkegiatan terkait stunting.

Grafik 1. Top 10 kegiatan stunting Tahun 2021



Dari tinjauan awal, didapati bahwa tidak terdapat pola korelasi antara besaran anggaran belanja terkait stunting dengan capaian penurunan angka stunting di kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan anggaran belanja terkait stunting (*value for money*), utamanya terkait pemilihan jenis belanja yang *impactful* di program/kegiatan terkait stunting, merupakan determinan penting dalam upaya penurunan angka stunting. Hal ini dapat dilihat grafik 4 kuadran berikut, dimana sumbu x adalah besaran belanja stunting per kapita dan sumbu y adalah persentase penurunan stunting.

Grafik 2. Analisis Kuadran belanja stunting daerah



Kemudian didapati bahwa nominal belanja jasa di kuadran II relatif dominan. Belanja Jasa di intervensi sensitif didominasi untuk jasa tenaga kesehatan, pendidikan (PAUD), kebersihan, dan persampahan. Terdapat juga belanja terkait honorarium di belanja jasa, namun persentasenya di kuadran II relatif rendah. Hal ini perlu diarahkan bahwa belanja jasa perlu difokuskan untuk tenaga pelayanan dan merasionalkan anggaran terkait honorarium.

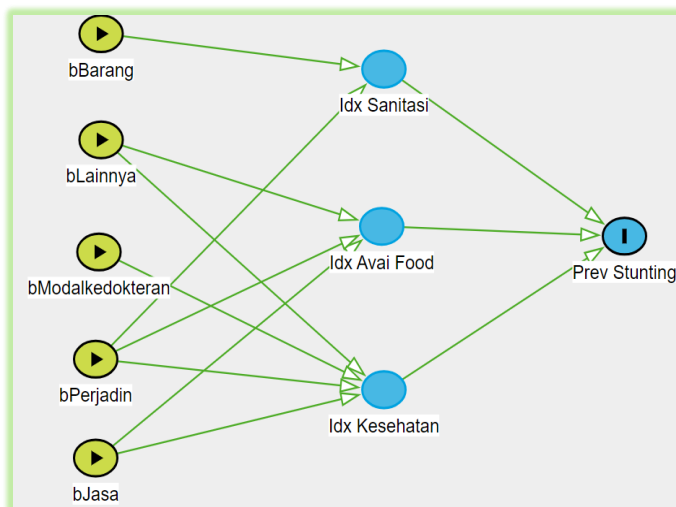
Optimalisasi Belanja Daerah untuk Penanganan Stunting

Metodologi

Setelah memahami bahwa terdapat perilaku belanja daerah terkait stunting yang berbeda antara daerah yang baik dalam penurunan stunting dan daerah yang tidak, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis belanja atau subkegiatan belanja stunting mana yang memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting di daerah tersebut. Hal ini dilakukan dengan estimasi besaran pengaruh jenis belanja terkait stunting terhadap stunting itu sendiri. Namun demikian, secara ekonometrik kami menyadari bahwa belanja daerah tidak secara langsung mempengaruhi penurunan stunting. Terdapat variabel intermediasi atau variabel utama yang berpengaruh secara langsung terhadap stunting. Variabel tersebut adalah tiga faktor-faktor utama penyebab stunting di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada awal bab artikel ini.

Berdasarkan hal di atas, kami menyusun pola hubungan jalur (path) antara jenis belanja lalu ke variable utama penyebab stunting lalu ke stunting untuk melihat pengaruh tiap-tiap jenis belanja terhadap stunting melalui ketiga faktor utama penyebab stunting berupa indek ketersediaan makanan, indeks akses sanitasi, dan indeks kesehatan (penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan) sebagaimana gambar hubungan jalur berikut ini:

Gambar 1. Diagram hubungan antara jenis belanja dan stunting.



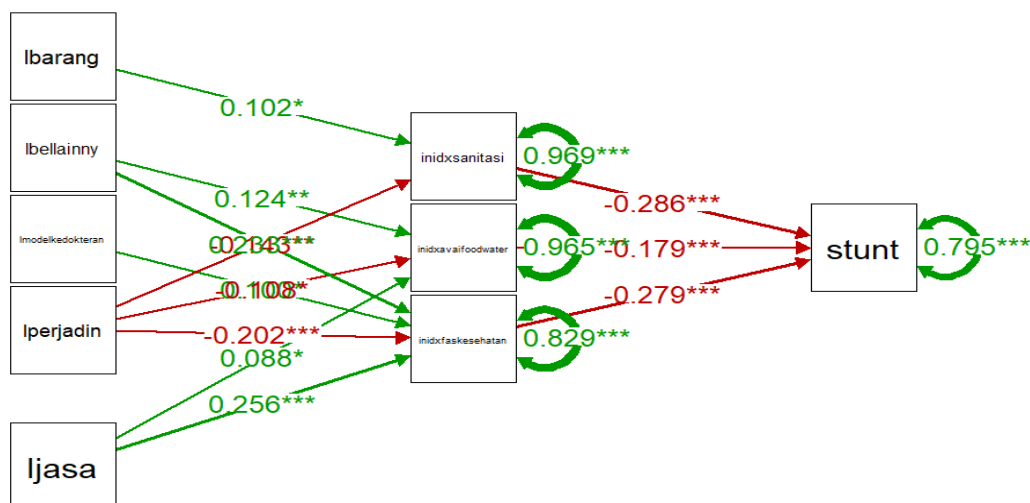
Asumsi yang digunakan adalah bahwa belanja Jasa mempengaruhi indeks kesehatan dan indeks ketersediaan pangan karena belanja jasa berisikan kegiatan terkait jasa layanan tenaga kesehatan dan kegiatan terkait penyediaan makanan, Belanja Perjadin mempengaruhi ketiga jenis indeks, Belanja Barang mempengaruhi tingkat sanitasi karena terdapat kegiatan penyediaan barang berupa kebutuhan sanitasi dan air bersih, Belanja Modal Kedokteran mempengaruhi indeks kesehatan karena terdapat kegiatan penyediaan alat dan layanan kedokteran, dan Belanja Lainnya mempengaruhi ketiga indeks.

Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Dari hasil estimasi regresi menggunakan model path analysis didapat hasil sebagai berikut:

Regressions:

	Estimate	Std.Err	z-value	P(> z)	Std.lv	Std.all
inidxfaskesehatan ~						
l_jasa (a)	0.307	0.049	6.259	0.000	0.307	0.256
l_perjadin	-0.189	0.038	-4.938	0.000	-0.189	-0.202
l_mdldkdktrn	0.094	0.038	2.455	0.014	0.094	0.100
l_bellainny	0.340	0.060	5.708	0.000	0.340	0.233
stunt ~						
inidxfsksht (b)	-1.711	0.246	-6.951	0.000	-1.711	-0.279
inidxvfdwtr (d)	-4.750	1.067	-4.454	0.000	-4.750	-0.179
inidxsants	-0.168	0.024	-7.138	0.000	-0.168	-0.286
inidxsanitasi ~						
l_perjadin	-1.401	0.432	-3.243	0.001	-1.401	-0.143
l_barang	1.796	0.776	2.314	0.021	1.796	0.102
inidxavaifoodwater ~						
l_jasa (c)	0.024	0.012	2.000	0.045	0.024	0.088
l_perjadin	-0.023	0.010	-2.444	0.015	-0.023	-0.108
l_bellainny	0.042	0.015	2.804	0.005	0.042	0.124



Defined Parameters:

	Estimate	Std.Err	z-value	P(> z)	Std.lv	Std.all
SIE1	-0.526	0.113	-4.651	0.000	-0.526	-0.071
SIE2	-0.116	0.064	-1.825	0.068	-0.116	-0.016
TE	-0.642	0.129	-4.991	0.000	-0.642	-0.087

Dari hasil path analysis, terlihat bahwa belanja-belanja yang signifikan berpengaruh terhadap ketiga jenis indeks. Belanja perjadin konsisten **berkorelasi negatif** terhadap ketiga jenis indeks dan Belanja Jasa memiliki pengaruh (*magnitude*) paling besar dari jenis belanja lainnya. Jika kita berfokus pada belanja jasa, pengaruh total dapat dihitung dengan menjumlahkan total *indirect effect*, sehingga didapat **total effect bel jasa ke stunting adalah -0,087**. Efek ini dapat dibaca sebagai suatu elastisitas, artinya secara rata-rata **1% kenaikan belanja jasa dapat menurunkan 0,087% penurunan stunting**.

Kesimpulan dan Saran

Untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dari sisi pemerintah daerah, langkah yang dapat diambil adalah optimalisasi belanja daerah terkait stunting. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan pada belanja yang paling berdampak besar untuk penurunan stunting di daerah secara umum (rata-rata) dalam hal ini hasil model regresi dengan path analysis adalah belanja jasa, seperti jasa tenaga kesehatan, jasa tenaga Pendidikan PAUD dan jasa layanan persampahan.

Lebih dalam lagi, Pemerintah daerah lah yang memiliki *knowledge* belanja jasa seperti apa atau kegiatan apa yang pas untuk daerahnya. Hal ini karena setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Dimana mungkin terdapat daerah yang masih terkendala terkait permasalahan ketersediaan gizi atau makanan saja tapi juga ada daerah yang masih terkendala penyediaan layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan saja. Namun demikian, fokusnya masih pada tataran belanja jasa karena belanja ini yang secara umum atau rata-rata efektif menurunkan stunting. Belanja jasa juga merupakan belanja yang sifatnya *immediate* dampaknya secara cepat dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Belanja modal memang penting untuk penanganan stunting namun sifatnya jangka panjang dan sifatnya basic atau dasar sehingga untuk percepatan penurunan stunting sesuai target di tahun 2024 sebesar 14% maka perlu akselerasi dan fokus pada yang dampaknya *immediate*. Namun demikian, dampak belanja modal dapat dikatakan masih *underestimated* dalam penelitian ini, dimana hal ini mungkin disebabkan penelitian ini belum menangkap secara penuh manfaat atau efek belanja modal karena data yang digunakan adalah data cross section tahun 2021 saja.

Daftar Pustaka

- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D. and Neufeld, L.M., 2018. A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & child nutrition*, 14(4), p.e12617.
- Fracassi, P., Picanyol, C., Knechtel, W., D'Alimonte, M., Gary, A., Pomeroy-Stevens, A. and Watts, R., 2017. Budget analysis for nutrition: guidance note for countries (update 2017).



INOVASI DAERAH

Inovasi Geoportal dan WebGis Kepong Bakol
Pemkab Kubu Raya – Kalimantan Barat

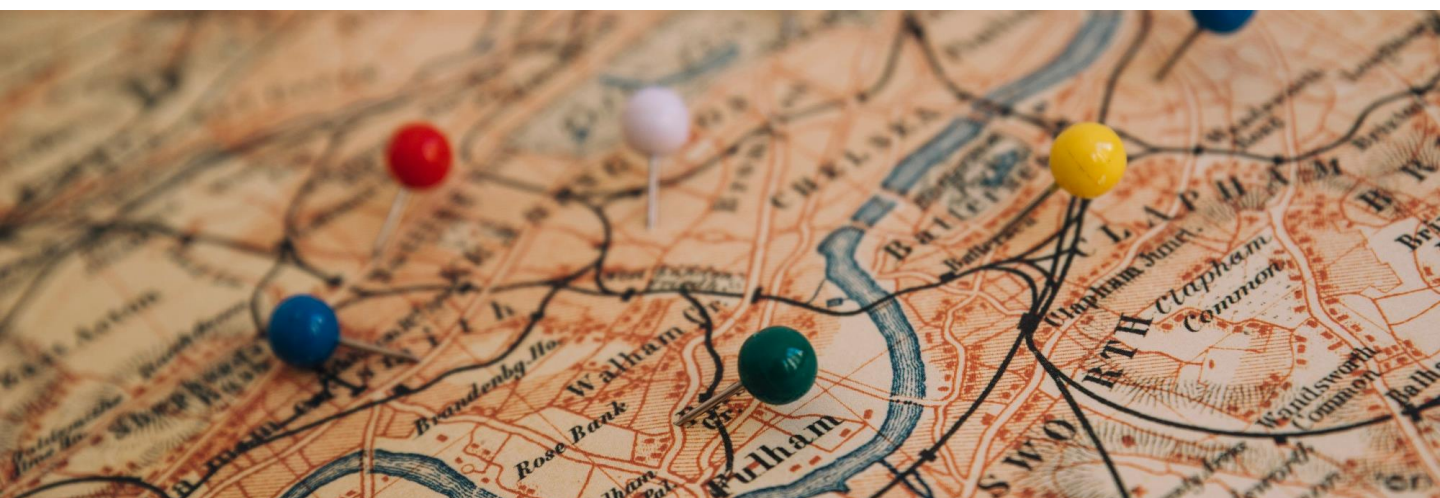
Rian Kelana Ednur dan Amelia Imanda Yusuf

Napoleon Bonaparte pernah berkata bahwa “*War is ninety percent information*” dimana informasi memegang peranan kunci dalam memenangkan suatu pertempuran baik itu pertempuran bersenjata atau pertempuran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi merupakan data yang telah diolah dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan sementara data merupakan catatan atau kumpulan dari beberapa fakta yang belum diolah. Hal ini terlihat bahwa data memiliki peran yang sangat krusial, terlebih di era *big data* seperti saat ini yang menuntut semua tindakan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Namun, kecepatan dan ketepatan tersebut pun harus didukung pula oleh keakuratan data sehingga keputusan yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas.

Era big data telah menghadirkan peluang dan tantangan baru bagi masyarakat modern dan juga bagi para *data scientist*. *Big data* merupakan istilah yang menggambarkan volume besar data, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, sehingga salah satu peluang terbesarnya adalah dapat menemukan pola populasi dan pola heterogenitas yang sebelumnya tidak terlihat dan tidak didapatkan apabila menggunakan dataset yang kecil. Di sisi lain, jumlah sampel dan dimensi yang besar dalam *big data* juga menghadirkan tantangan tersendiri dari sisi komputasi dan pengolahan statistik, termasuk adanya potensi kesalahan pengukuran.

Pentingnya *big data* bukan hanya menitikberatkan pada seberapa banyak/besar data yang dimiliki, melainkan pada apa yang dapat dilakukan dengan data yang dimiliki tersebut. Database untuk *big data* dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder untuk kemudian dilakukan analisa demi menemukan jawaban yang memungkinkan terhadap efisiensi biaya, efisiensi waktu, pengembangan produk baru, dan untuk pengambilan keputusan.

Peluang dan tantangan terkait *big data* nampaknya telah dikelola dengan baik oleh Pemkab Kubu Raya. Hal ini terbukti dengan disusunnya inovasi **Geoportal** dan **WebGis Kepong Bakol** untuk memaksimalkan penyelenggaraan informasi geospasial. Peluncuran program ini antara lain untuk menjawab beberapa persoalan yang dihadapi oleh Pemkab Kubu Raya dalam penyusunan perencanaan anggaran yang antara lain berupa 1) tidak *update*-nya data yang tersedia; 2) data tersedia tapi tidak akurat; 3) data antar SKPD belum sinkron dan terkadang sering tumpang tindih.



Melalui aplikasi Geoportal dan Webgis Kepong Bakol, seluruh warga diajak untuk bersama-sama mengepung, atau dalam bahasa setempat disebut kepong bakol, agar dapat turut merasakan pentingnya keakuratan data dan dapat turut serta membangun sesuatu yang menjadi kebutuhan bersama, yaitu penggunaan APBD yang tepat sasaran. Penerapan aplikasi ini dapat mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Pemkab Kubu Raya yang jauh lebih efektif dan efisien karena didasarkan pada data yang lebih akurat, dimana input data dilakukan secara langsung dan berasal dari level terbawah, yaitu level rumah tangga. Disamping itu, dengan penerapan aplikasi ini, data dapat diperoleh secara efektif dan efisien dengan kualitas data yang jauh lebih akurat dan handal bagi penyelenggaraan program/kegiatan pemerintah. Di bawah koordinasi kepala desa, data tersebut dilakukan *updating* secara berkala oleh petugas yang mempunyai akses sehingga dapat diperoleh ketepatan rencana, sasaran, jumlah, maupun subjek-objek dan sebaran yang ada

Lebih lanjut, aplikasi ini juga dapat menjadi sarana berbagi pakai data dan informasi geospasial antar SKPD di lingkup Pemkab Kubu Raya. Secara tidak langsung, penggunaan aplikasi ini turut mensukseskan program satu data dari pemerintah pusat yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat maupun instansi daerah. Data yang tercatat dalam aplikasi ini dapat menghubungkan semua subyek dan obyek geospasial secara *by name by address* lengkap dengan koordinat lokasi, foto visual, dan info-info terkait subyek dan obyek tersebut. Disamping itu, terdapat pula informasi demografi penduduk seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, termasuk masalah kesehatan seperti stunting serta masalah ibu dan bayi yang dapat di-*capture* dari aplikasi ini. Dengan data yang terintegrasi ini, sebaran tematik pembangunan dapat terpetakan dengan jelas. Pemerintah daerah juga dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga, serta tidak ada tumpang tindih program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya dalam skema subsidi atau bantuan sosial. Pada akhirnya, dengan aplikasi ini diharapkan semua proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring evaluasi dan pengawasan akan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.



Dengan keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI akan mereplikasinya sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan secara nasional dan dapat berdampak positif pada tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, dari Sabang sampai Merauke tidak hanya untuk stunting melainkan juga untuk tema lainnya seperti pengangguran, kemiskinan, maupun pertumbuhan ekonomi.

Alvin Toffler dalam bukunya *The Third Wave* (1980) mengatakan bahwa “siapa yang **menguasai informasi**, dia akan **menguasai dunia**” dan *nampaknya pepatah ini benar-benar diterapkan dengan seksama oleh Pemkab Kubu Raya dengan melibatkan seluruh warganya dalam melakukan penginputan sekaligus pemutakhirannya, sehingga keputusan atau kebijakan yang akan di ambil akan lebih tepat sasaran dan berdampak kepada masyarakat. Di sisi lain, ada pepatah lama yang mengatakan juga bahwa “garbage in, garbage out” dimana bila data yang diinput tersebut valid dan benar, maka informasi yang akan dihasilkan untuk pengambilan keputusannya pun akan benar, begitu juga sebaliknya. Kedua pepatah di atas berkaitan dengan permasalahan tentang ketersediaan data, nampaknya menjadi titik pusat dari inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya, yang dikombinasikan pula dengan peran serta dari masyarakat yang secara tidak langsung mengajarkan kepada mereka akan pentingnya “melek data” dan prinsip *good governance* yang dijunjung tinggi oleh Pemkab Kubu Raya. Kerjasama dari 3 level pemerintahan yaitu pemerintah (pusat maupun daerah), sektor swasta, dan masyarakat telah menjadi kekuatan utama atas keberhasilan dari inovasi ini.*





**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

Luky Alfirman • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Radies Kusprihanto Purbo • Britany Alasen Sembiring • Muhammad Hijrah • Rian Kelana
Ednur • Ananta Sugiyarto • Rossi Rizki Bestari • Adi Saputra • Efriyazwar • Amelia Imanda
Yusuf • Muhammad Harry Kurniawan • Magdalena Pohan • Deni Candra N. • Kharisma
Permata Karunianingtyas